Katalog BPS : 41002004.1671

INDIKATOR TENAGA KERJA & KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2013

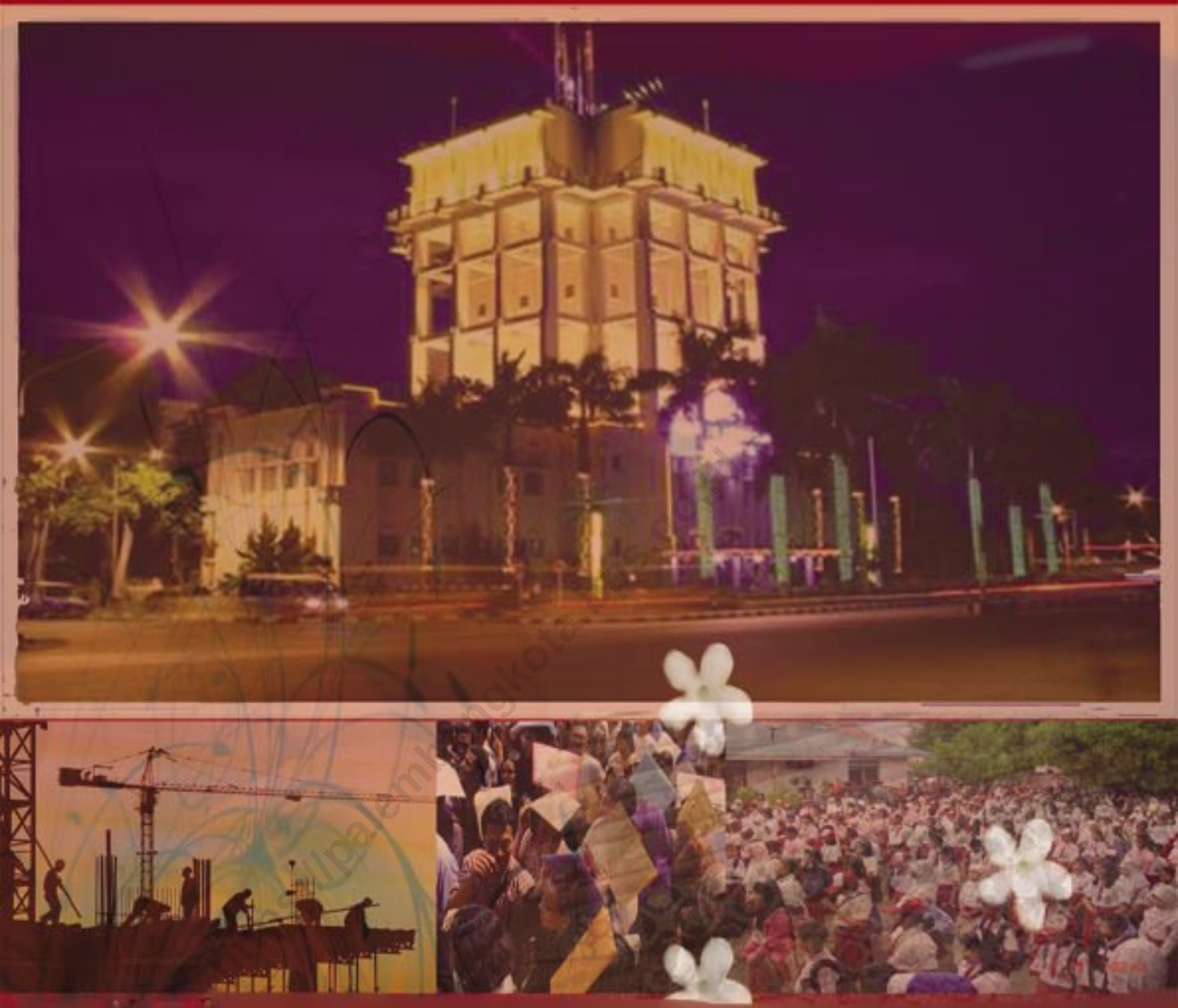

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Melaksanakan pembangunan suatu daerah bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Untuk itu, dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan diperlukan berbagai data dan informasi yang lengkap dan akurat.

Berkaitan dengan itu, maka setiap tahunnya Pemerintah Kota Palembang menerbitkan ***Buku Indikator Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang*** yang berisikan data dan informasi serta kajian yang bersifat analisis dan komprehensif, ini dimaksudkan agar berbagai instansi dan seluruh lapisan masyarakat dapat melihat hasil evaluasi dan indikator dari berbagai aspek terutama aspek sosial ekonomi dan sosial budaya yang diperuntukkan sebagai bahan dalam memprediksi perkembangan yang akan datang dan penyusunan perencanaan pembangunan lebih lanjut.

https://palembangkota.bps.go.id

Harapan kami semoga ***Buku Indikator Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang Tahun 2013*** dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Palembang, September 2014

WALIKOTA PALEMBANG

H. ROMI HERTON, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya, maka penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2013 dapat diselesaikan.

Buku ini menyajikan informasi mengenai kondisi dan situasi sosial ekonomi masyarakat di Kota Palembang. Dengan adanya data dan informasi ini, diharapkan dapat memberikan potret nyata mengenai permasalahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat Kota Palembang. Selain itu, dari indikator yang tersaji pada publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Pemerintah Kota Palembang dalam membantu untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.

https://palembangkota.bps.go.id

Palembang, September 2014

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Kepala,

Ir. Reflin Arda
NIP. 19670402 199103 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR WALIKOTA PALEMBANG i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Ruang Lingkup 3
1.4. Sumber Data 4
1.5. Sistematika Penulisan 4

BAB II METODOLOGI
2.1 Metode Pengumpulan Data 6
2.2 Metode Pengolahan Data 7
2.3 Metode Analisis dan Konsep Definisi 8

BAB III KONDISI UMUM
3.1 Kondisi Geografis dan Administrasi 14
3.2 Sosial Budaya 18

BAB IV KEPENDUDUKAN
4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk 20
4.2 Rasio Jenis Kelamin 23
4.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk 25
4.4 Struktur Umur 27
BAB V KESEHATAN

https://palembangkota.bps.go.id

5.1. Fertilitas 32
5.1.1 Anak Lahir Hidup 33
5.1.2. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama 35
5.1.3. Status Perkawinan 37
5.2. Kesehatan Balita 39
5.2.1. Penolong Kelahiran..... 40
5.2.2. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)..... 42
5.3. Status Kesehatan 44
5.3.1. Angka Kesakitan..... 45
5.3.2. Rata-rata Lama Sakit 46
5.4. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan 48
5.5. Penggunaan Alat KB 50

BAB VI PENDIDIKAN
6.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 52
6.2. Angka Partisipasi Murni (APM) 53
6.3. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan..... 54
6.4. Rata-rata Lama Sekolah 56
6.5. Angka Melek Huruf 57

BAB VII KETENAGAKERJAAN
7.1. Angkatan Kerja dan TPAK 62
7.2. Distribusi Sektoral 66
7.3. Status Pekerjaan..... 67

BAB VIII KONDISI PEREKONOMIAN
8.1. Pertumbuhan Ekonomi 71
8.2. Struktur Perekonomian 73
8.3. Pendapatan Perkapita 76

BAB IX PERUMAHAN DAN FASILITAS

https://palembangkota.bps.go.id

9.1. Kondisi Fisik Bangunan 81
9.1.1. Rata-Rata Luas Lantai 81
9.1.2. Jenis Atap 82
9.1.3. Jenis Dinding 83
9.1.4. Jenis Lantai 85
9.2. Utilitas dan Fasilitas Tempat Tinggal 87
9.2.1. Sumber Penerangan 87
9.2.2. Fasilitas Air Minum 88
9.2.3. Sumber Air Minum 90
9.2.4. Fasilitas Tempat Buang Air Besar 91
9.2.4. Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir Tinja 92

BAB X KEMISKINAN
10.1 Definisi dan Metode Pengukuran Kemiskinan 94
10.2 Indika
10.3 Perkembangan Kemiskinan di Kota Palembang 96

https://palembangkota.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan di Kota Palembang Menurut Kecamatan, Tahun 2013 17
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Palembang Menurut Kecamatan Tahun 2012-2013..... 22
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2013 24
Tabel 4.3 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kota Palembang Menurut Kecamatan Tahun 2013 26
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 29
Tabel 5.1 Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jumlah Anak yang dilahirkan Hidup Tahun 2013 34
Tabel 5.2 Persentase Penduduk Perempuan 10 Tahun keatas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2012 dan 2013..... 36
Tabel 5.3 Persentase Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan 2013 38
Tabel 5.4 Persentase Balita Menurut Penolong Pertama Waktu Lahir Tahun Tahun 2012-2013 40
Tabel 5.5 Rata-rata Lama Balita Usia 1-4 tahun mendapatkan ASI dan Persentase Balita Usia 1-4 tahun mendapatkan ASI Esklusif di Kota Palembang Tahun 2008-2013 43
Tabel 5.6 Angka Kesakitan Penduduk Kota Palembang Tahun 2008-2013..... 45
Tabel 5.7 Rata-rata Lama Sakit di Kota Palembang Tahun 2008-2013 46
Tabel 5.8 Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan, Kota Palembang Tahun 2008-2013 47
Tabel 5.9 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Keatas Yang Menggunakan Alat KB Tahun 2008-2013 49
Tabel 5.10 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Keatas Menurut Jenis Pemakaian Alat KB Tahun 2013..... 50
Tabel 6.1 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 53
Tabel 6.2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan .....Jenis

https://palembangkota.bps.go.id

Kelamin, Kota Palembang Tahun 2013 54
Tabel 6.3 Persentase Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Palembang Tahun 2008-2013 55
Tabel 6.4 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Kota Palembang Tahun 2008-2013 57
Tabel 6.5 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Kota Palembang Taun 2008-2013 58
Tabel 7.1 Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas dirinci Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2012-2013 63
Tabel 7.2 Persentase Penduduk 15 Tahun keatas dirinci Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2011-2012 65
Tabel 7.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Palembang Tahun 2011-2012 67
Tabel 7.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Perkerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2012-2013..... 68
Tabel 7.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin Kota Palembang Tahun 2008-2013 69
Tabel 8.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Palembang Tahun 2009-2013 73
Tabel 8.2 Peranan Masing-masing Sektor Dalam Pembentukan PDRB ADHB Kota Palembang Tahun 2009 - 2013 75
Tabel 8.3 Pendapatan Perkapita dan Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Palembang Tahun 2008 - 2013 78
Tabel 9.1 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai di Kota Palembang Tahun 2012 - 2013 82
Tabel 9.2 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Palembang Tahun 2009-2013 83
Tabel 9.3 Persentase Rumahtangga Menurut Dinding Terbanyak di Kota Palembang Tahun 2009-2013 84

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 9.4 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Palembang Tahun 2009-2013 86
Tabel 9.5 Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Sumber Penerangan di Kota Palembang Tahun 2009-2013 88
Tabel 9.6 Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum Terbanyak di Kota Palembang Tahun 2009-2013..... 89
Tabel 9.7 Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Terbanyak di Kota Palembang Tahun 2009-2013 91
Tabel 9.8 Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Terbanyak Tahun 2009-2013..... 92
Tabel 9.9 Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2009-2013..... 93
Tabel 10.1 Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan dan Garis Kemiskinan Kota Palembang Tahun 2008 - 2013..... 96

https://palembangkota.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kota Palembang 14
Gambar 4.1. Piramida Penduduk Kota Palembang Tahun 2013 30
Gambar 5.1. Persentase Balita Menurut Penolong Terakhir Waktu Lahir di Kota Palembang Tahun 2013 42
Gambar 6.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Palembang Tahun 2013 56
Gambar 7.1. Konsep Ketenagakerjaan 61
Gambar 8.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kota Palembang Tahun 2008-2013 71
Gambar 8.2. Pendapatan Perkapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palembang Tahun 2008-2013 76
Gambar 8.3. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 77
82

https://palembangkota.bps.go.id

P E N D A H U L U A N

BAB I

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera serta adil dan makmur baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material (lahiriah) seperti pangan, sandang, perumahan, maupun kebutuhan spiritual (batiniah) seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, hiburan, status sosial dan kesempatan kerja.

Bertolak dari tujuan tersebut, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan pembangunan di semua bidang, yang menyangkut berbagai aspek kebutuhan hidup masyarakat. Kesemuanya itu memerlukan perencanaan yang cermat dan terarah, yang harus didukung oleh tersedianya data dan informasi yang lengkap serta mampu menggambarkan sejauh mana capaian dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur hasil-hasil pembangunan dibutuhkan suatu tolok ukur yang dapat membantu kita dalam mengadakan penilaian terhadap perubahan-perubahan selama proses pembangunan tersebut, sehingga dapat ditinjau seberapa jauh kemajuan yang telah diperoleh oleh masyarakat. Untuk itu, dalam rangka

https://palembangkota.bps.go.id

perencanaan, pemantauan dan penentuan sasaran serta pengukuran keberhasilan suatu tahapan pembangunan, diperlukan ukuran-ukuran statistik terutama di bidang sosial, atau yang lebih dikenal dengan indikator statistik kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik Kota Palembang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas menyediakan data statistik dasar, sektoral maupun khusus memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan data dan informasi pembangunan yang terjamin kualitas dan kuantitasnya, sehingga data atau informasi ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Palembang khususnya di masa datang.

https://palembangkota.bps.go.id

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang Tahun 2013 ini secara umum adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan dan dinamika penduduk di Kota Palembang, lebih khusus lagi untuk melihat keadaan tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini akan dilihat dari berbagai aspek sosial ekonomi seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan indikator-indikator sosial lainnya.
2. Untuk melihat keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan selama ini dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Palembang, melalui indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang ada.

3. Untuk mendapatkan tolok ukur dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palembang.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari disusunnya Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang Tahun 2013 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang, terutama kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi dan situasi tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat Kota Palembang.
3. Dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur akuntabilitas publik terhadap kinerja pihak eksekutif daerah terutama dalam hal pembangunan di bidang sosial ekonomi kemasyarakatan.
4. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai keadaan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.
5. Sebagai salah satu referensi mengenai kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palembang untuk kepentingan masyarakat umum maupun kalangan swasta dan akademisi.

https://palembangkota.bps.go.id

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Dalam penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang ini diperlukan batasan-batasan wilayah yang akan dijadikan konsep regional maupun wilayah tugas pada saat pelaksanaan lapangan. Pada tahap pelaksanaan lapangan

nantinya ruang lingkup wilayah adalah Wilayah Administrasi Kota Palembang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang, agar setiap pelaksanaan pekerjaan mempunyai batasan-batasan yang jelas antar tahapan. Adapun ruang lingkup pekerjaan dalam penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang ini adalah :

1. Melakukan perencanaan dan persiapan
2. Melakukan pengumpulan dan kompilasi data.
3. Melakukan pengolahan hasil pengumpulan data.
4. Menganalisis dan menyajikan hasil dalam bentuk buku.

https://palembangkota.bps.go.id

1.4. Sumber Data

Data sosial ekonomi utama yang digunakan dalam menganalisis nantinya bersumber dari hasil olahan data mentah Susenas 2013. Data yang terkumpul menyangkut keadaan kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian dan kemiskinan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang Tahun 2013 ini disajikan dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Bab II Metodologi,

Bab III Kondisi Umum,

Bab IV Kependudukan,

Bab V Kesehatan,

Bab VI Pendidikan,

Bab VII Ketenagakerjaan,

Bab VIII Kondisi Perekonomian,

Bab IX Perumahan dan Fasilitas.

Bab X Kemiskinan

https://palembangkota.bps.go.id

M E T O D O L O G I

BAB II

2.1. Metode Pengumpulan Data

Sebelum dilakukan pengumpulan data disusun terlebih dahulu kuesioner dan worksheets sebagai instrumen tempat pengisian data-data yang diperoleh. Data yang dicakup dalam publikasi ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh sumber data relevan yang telah dikumpulkan oleh petugas (surveyor).

Adapun data-data yang akan ditampilkan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang Tahun 2013 ini berasal dari rumah tangga terpilih (sampel) dan dinas/instansi terkait. Secara rinci data-data atau indikator yang akan disajikan pada publikasi ini adalah :

1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk
2. Laju Pertumbuhan Penduduk
3. Rasio Ketergantungan
4. Rasio Jenis Kelamin (RJK)
5. Angka Harapan Hidup (AHH)
6. Angka Kesakitan
7. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
8. Angka Putus Sekolah
9. Angka Melek Huruf

https://palembangkota.bps.go.id

10. Pendidikan yang Ditamatkan
11. Rata-rata Lama Sekolah
12. Angkatan Kerja dan TPAK
13. Produktivitas Pekerja
14. Distribusi Sektoral Tenaga Kerja
15. Kesempatan Kerja
16. Pengangguran Terbuka
17. dll

2.2. Metode Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan menggunakan cara manual dan dengan bantuan komputer atau *software*.

Pada tahap pertama pengolahan data, metode yang digunakan adalah secara manual (*pra komputer*). Pengolahan data secara manual ini terdiri atas tahap pemeriksaan (*verification*).

Setelah tahap *pra komputer* selesai, pengolahan data dilanjutkan dengan bantuan komputer. Pada tahap ini dilakukan perekaman data (*entry data*), pengecekan hasil entry (validasi), pengolahan data dengan program SPSS versi 2.0 dan proses tabulasi untuk mempermudah analisis dengan program Excel 2007.

https://palembangkota.bps.go.id

2.3. Metode Analisis dan Konsep Definisi

Analisis yang dilakukan dalam penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang ini menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis deskriptif memberikan penjelasan atau gambaran mengenai interpretasi dari angka-angka yang disajikan, yang juga disertai tabel dan grafik. Dalam penyusunan publikasi ini, ada beberapa indikator atau ukuran Statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan, diantaranya adalah :

https://palembangkota.bps.go.id

- **Rasio Jenis Kelamin**

  Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan banyaknya jumlah penduduk perempuan dari 100 orang penduduk laki-laki. Jika nilai rasio jenis kelamin ini lebih besar dari 100 berarti terdapat lebih banyak penduduk laki-laki di banding penduduk perempuan di wilayah tersebut

$$\textbf{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{\textbf{Jumlah Penduduk Laki-Laki}}{\textbf{Jumlah Penduduk Perempuan}} \textbf{ X 100}$$

- **Angka Beban Tanggungan**

  Angka beban tanggungan lebih di kenal dengan *Dependency Ratio* (DR). DR merupakan persentase antara jumlah penduduk usia non produktif yaitu usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun keatas per jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Berarti DR menunjukkan banyaknya jumlah penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh 100 penduduk berusia produktif.

$$DR = \frac{(\text{Penduduk } 0 - 14 \text{ tahun}) + (\text{Penduduk} > 65 \text{ tahun})}{\text{Penduduk } 15 - 64 \text{ tahun}} \times 100$$

- **Angka Kesakitan**

Angka kesakitan yang dikenal dengan istilah '*morbidity rate*' ini merupakan proporsi jumlah penduduk yang mengalami sakit terhadap jumlah penduduk total pada suatu wilayah. *Morbidity Rate* ini berarti banyaknya penduduk yang pernah mengalami sakit dari 100 orang penduduk.

$$\text{Morbidity Rate} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Mengalami Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- **Rata-Rata Anak Lahir Hidup**

Rata-rata anak lahir hidup adalah Jumlah anak yang pernah di lahirkan hidup oleh seluruh wanita usia subur (15-49 tahun) yang pernah kawin per jumlah total seluruh wanita usia subur dalam suatu wilayah. Artinya angka ini menunjukkan rata-rata jumlah anak lahir hidup yang pernah dimiliki oleh setiap wanita usia subur.

$$\text{Rata-Rata Anak Lahir Hidup} = \frac{\text{Jumlah ALH dari Wanita Usia Subur (15-49 thn)}}{\text{Jumlah Wanita Usia Subur (15–49 tahun)}}$$

https://palembangkota.bps.go.id

- **Rata-Rata Anak Masih Hidup**

Rata-rata anak masih hidup adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup oleh seluruh wanita pernah kawin usia subur (15-49 tahun) yang sampai saat ini anak tersebut masih hidup per jumlah total seluruh wanita usia subur dalam suatu wilayah. Artinya angka ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang sampai saat ini masih hidup dari setiap wanita usia subur.

$$\text{Rata-Rata Anak Masih Hidup} = \frac{\text{Jumlah AMH dari Wanita Usia Subur (15-49 thn)}}{\text{Jumlah Wanita Usia Subur (15–49 tahun)}}$$

- **Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)**

Angka Partisipasi SD ini merupakan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun. Artinya angka ini menunjukkan persentase anak berusia 7 sampai 12 tahun yang sedang menduduki bangku sekolah.

$$\textbf{Angka Partisipasi 7-12 tahun} = \frac{\textbf{Jumlah Penduduk (7-12) yg Sekolah}}{\textbf{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \textbf{ X 100}$$

https://palembangkota.bps.go.id

- **Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)**

Angka Partisipasi SLTP ini merupakan angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun. Artinya angka ini menunjukkan persentase anak berusia 13 sampai 15 tahun yang sedang menduduki bangku sekolah..

$$\text{Angka Partisipasi 13-15 tahun} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (13-15) yg Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun}} \times 100$$

- **Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)**

Angka Partisipasi 16-18 tahun ini merupakan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun. Artinya angka ini menunjukkan persentase anak berusia 16 sampai 18 tahun yang sedang menduduki bangku sekolah.

$$\text{Angka Partisipasi 16-18 tahun} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (16-18) yg Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun}} \times 100$$

- **Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis terhadap seluruh jumlah penduduk yang beruisa 10 tahun keatas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa angka ini menunjukkan banyaknya penduduk berusia

https://palembangkota.bps.go.id

10 tahun keatas yang bisa baca tulis dari 100 orang penduduk berusia 10 tahun keatas.

$$\text{Angka Melek Huruf} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bisa Baca Tulis (10 tahun keatas)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun keatas}} \times 100$$

- **Angka Buta Huruf**

Angka Buta Huruf ini merupakan kebalikan dari angka melek huruf. Angka Buta Huruf merupakan persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis terhadap seluruh jumlah penduduk yang beruisa 10 tahun keatas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa angka ini menunjukkan banyaknya penduduk berusia 10 tahun keatas yang masih belum bisa baca tulis dari 100 orang penduduk berusia 10 tahun keatas.

https://palembangkota.bps.go.id

$$\text{Angka Buta Huruf} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Tak Bisa Baca Tulis (10 tahun keatas)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun keatas}} \times 100$$

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau di singkat dengan TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk usia kerja (10 tahun keatas). Secara sederhana dapat dikatakan TPAK adalah banyaknya angkatan kerja dari 100 orang penduduk usia kerja (10 tahun keatas).

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 10 Tahun keatas}} \times 100$$

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran atau *open-unemployment rate* (tingkat pengangguran terbuka) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang sedang mencari kerja atau tidak bekerja terhadap jumlah angkatan kerja itu sendiri. Angka ini diinterpretasikan sebagai jumlah pengangguran (tidak bekerja atau sedang mencari kerja) dari 100 orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Yang Tidak Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

https://palembangkota.bps.go.id

KONDISI UMUM

BAB III

3.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Letak Kota Palembang sangat strategis karena berada pada salah satu jalur lintas Sumatera, yang menjadi jalur transportasi antar propinsi maupun antar kabupaten. Kota Palembang berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebelah utara, timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

https://palembangkota.bps.go.id

Gambar 3.1 : Peta Administrasi Kota Palembang

Kota Palembang memiliki luas wilayah sebesar 400,61 km^2 dengan letak astronomis antara 104^{0}37' dan 104^{0}52' Bujur Timur dan antara 2^{0}52' dan 3^{0}5'

Lintang Selatan. Keadaan alam Kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21-32 derajat Celsius, curah hujan 22-428 mml per tahun.

Wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan, dimana saat ini jumlah kecamatan di Kota Palembang menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan yang sebelumnya hanya 14 kecamatan dan 103 keluarahan. Dua kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Alang-alang Lebar yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Sematang Borang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sako. Sementara 4 kelurahan yang baru adalah kelurahan Talang Jambe yang merupakan pecahan kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi yang merupakan pecahan Kelurahan Alang-alang Lebar dan Sako Baru pecahan dari Kelurahan Sako, dan terakhir Kelurahan Karya Mulya pecahan dari Kelurahan Sukamulya.

Topografi Kota Palembang berada pada ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut dengan komposisi : 48 persen tanah dataran yang tidak tergenang air, 15persen tanah tergenang secara musimam dan 35 persen tanah tergenang terus menerus sepanjang musim. Lokasi daerah yang tertinggi berada di Bukit Siguntang Kecamatan Ilir Barat I, dengan ketinggian sekitar 10 meter dpl, sedangkan kondisi daerah terendah berada di daerah sungai Lais, Kecamatan Ilir Timur II. Kota Palembang dibedakan menjadi daerah dengan topografi mendatar sampai dengan landai, yaitu dengan kemiringan berkisar antara 0-3 derajat dan daerah dengan topografi bergelombang dengan kemiringan berkisar antara 2-10 derajat. Sebagai besar dari wilayah Kota Palembang merupakan dataran rendah yang landai dengan ketinggian tanah rata-rata 12 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah yang bergelombang di temukan di beberapa tempat seperti

https://palembangkota.bps.go.id

Kawasan Kenten, terdapat perbedaan karakter topografi antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir.

Berdasarkan Kondisi geologi, Kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam terdiri dari tanah berupa lapisan alluvial dan lempung berpasir, di bagian selatan kota, batuan berupa pasir lempung yang tembus air, sebelah utara berupa batuan lempung pasir yang kedap air, sedangkan sebelah barat berupa batuan lempung kerikil, pasir lempung yang tembus air hingga kedap air.

Kota Palembang dari tinjauan hidrologi terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. terdapat 4 sungai besar yang melintasi kota Palembang. Sungai musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter , ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter, Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rat-rata 103 meter. disampin sugai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat sekitar 68 anak sungai aktif), yang lebarnya berkisar antara 3-20 meter.

Fungsi sungai di Kota Palembang sebelumnya adalah sebagai sarana transportasi dan pengangkutan ke daerah pendalaman, namun sekarang sudah banyak mengalami perubahan fungsi antara lain sebagai drainase dan untuk pengedalian banjir. Fungsi anak-anak sungai yang semula sebagai daerah tangkapan air, sudah banyak berubah fungsinya menjadi permukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, dimana rata-rata laju alih fungsi sungai menjadi ini diperkirakan sebesar 6persen per tahun.

https://palembangkota.bps.go.id

Dilihat dari persentase luas wilayah di setiap kecamatan di Kota Palembang, Kecamatan Gandus mempunyai persentase yang terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kota Palembang. Luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi menurut kecamatan di Kota Palembang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan di Kota Palembang Menurut Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
01. Ilir Barat II	6,22	7
02. Gandus	68,78	5
03. Seberang Ulu I	17,44	10
04. Kertapati	42,56	6
05. Seberang Ulu II	10,69	7
06. Plaju	15,17	7
07. Ilir Barat I	19,77	6
08. Bukit Kecil	9,92	6
09. Ilir Timur I	6,50	11
10. Kemuning	9,00	6
11. Ilir Timur II	25,58	12
12. Kalidoni	27,92	5
13. Sako	18,04	4
14. Sematang Borang	36,98	4
15. Sukarami	15,45	7
16. Alang-alang Lebar	34,58	4
Jumlah	14 265,9	107

Sumber : Palembang Dalam Angka Tahun 2013, BPS

https://palembangkota.bps.go.id

Kota Palembang yang terletak di dataran rendah memiliki 30 persen wilayah berupa rawa yang terdiri atas rawa reklamasi dan rawa perlindungan. Struktur rawa yang ada di Kota Palembang juga dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Musi dan sungai-sungai lain yang bermuara di Sungai Musi. Satuan geomorfik rawa pada umumnya dicirikan oleh terbentuknya cekungan yang lebih

luas, dengan kedalaman relative dangkal, genangan air yang relative stagnant (yang tergenang tidak mengalir, sepanjang masa), dan bahkan di beberapa lokasi dijumpai pula area rawa yang telah kering atau tak berair kecuali musim hujan. Satuan geomorfik rawa banyak mendominasi terutama kawasan barat, kawasan timur, daerah seberang ulu I, dan seberang Ulu II Kota Palembang. Pada saat ini dijumpai pula beberapa cekungan yang relative lebih dalam bila dibandingkan dengan beberapa daerah disekitarnya, dan bentuk bentang alamnya ini merupakan perairan yang ditumbuhi oleh gulma, yang lazim disebut dengan lebak, yang terdapat di kecamatan Ilir Barat I, Ilir Timur I, dan Ilir Timur II.

3.2. SOSIAL BUDAYA

Kota Palembang tidak hanya didiami oleh penduduk asli Palembang, yang termasuk dalam etnis melayu, tetapi juga oleh berbagai pendatang seperti dari jawa, sunda, minangkabau, dan lain, Namun demikian etnis melayu merupakan penduduk mayoritas, dengan demikian budaya masyarakat sangat kental dengan budaya Palembang. Dari segi jumlah penduduk menurut agama, penduduk beragama islam merupakan penduduk mayoritas yaitu sekitar 99 persen penduduk Palembang beragama Islam, sisanya merupakan gabungan penduduk beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, dan Hindu.

https://palembangkota.bps.go.id

KEPENDUDUKAN

BAB IV

Jumlah Penduduk Indonesia merupakan yang terbanyak dibandingkan Negara-negara yang Sedang Berkembang lainnya. Bahkan jika kita bandingkan dengan seluruh negara¸jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ketiga dalam Cina dan India. Lazimnya negara yang sedang membangun, Indonesia memiliki berbagai masalah kependudukan seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang relative tinggi dengan persebaran penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan karena pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain masalah jumlah penduduk yang besar dengan distribusi yang tidak merata di Indonesia, masalah lain yang lebih spesifik yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi, Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan.

Permasalahan kependudukan di atas mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap masa depan kehidupan masyarakat dan pembangunan masyarakat itu sendiri, terutama apabila ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan pokok,

https://palembangkota.bps.go.id

pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan aspek social kemasyarakatan lainnya.

Di bidang pendidikan misalnya meskipun dengan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan juga diselipkan program untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tetapi secara umum mutu pendidikan masyarakat belum sepenuhnya memuaskan. Hal ini terutama disebabkan oleh usaha-usaha yang dijalankan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan senantiasa akan berhadapan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, sehingga tuntunan akan berbagai fasilitas pendidikan akan lebih tinggi pula.

Permasalahan penduduk di Kota Palembang tidak jauh berbeda dengan permasalahan kependudukan di Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Sumatera Selatan pada khususnya seperti yang telah dikemukakan pada bahasan sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah haruslah juga mencakup kebijaksanaan dalam bidang kependudukan.

https://palembangkota.bps.go.id

4. 1. Laju Pertumbuhun Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2012 sebanyak 1.503.485 jiwa, dan meningkat menjadi sebesar 1.535.900 jiwa pada tahun 2013. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Palembang sebesar 1,46 persen, artinya pada tahun 2013 penduduk Kota Palembang bertambah sebanyak 1,46 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 (Tabel 4.1).

Jika kita *breakdown* ke tingkat Kecamatan, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke tahun 2013 tertinggi berada di Kecamatan Alang-alang Lebar

yaitu sebesar 5,80 persen. Artinya jumlah penduduk di Kecamatan Alang-alang Lebar pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 5,80 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Alang-alang Lebar tersebut diatas laju pertumbuhan Kota Palembang secara keseluruhan. Meningkatnya jumlah penduduk Kecamatan Alang-alang Lebar dari tahun sebelumnya cukup sesuai dan menggambarkan kondisi dilapangan, mengingat pesatnya pembangunan perumahan dan pemukiman di Kecamatan Alang-alang Lebar yang merupakan kota satelite yang berada di perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

Kecamatan Ilir Timur I merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil yaitu sebesar -2,20 persen. Artinya jumlah penduduk di Kecamatan Ilir Timur I di tahun 2013 berkurang sebesar -2, 20 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2012. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ilir Timur I berada dibawah laju pertumbuhan penduduk Kota Palembang secara keseluruhan. Kondisi ini disinyalir akibat sebagian besar wilayah kelurahan di Kecamatan Ilir Timur I berada dikawasan pertokoan atau pasar di sepanjang jalan Jenderal Sudirman yang merupakan pusat perbelanjaan di Kota Palembang. Sebagaian besar wilayah pada kawasan ini merupakan *blok sensus* jenuh yang bermakna kondisi wilayah yang sempit sehingga pertumbuhan penduduk dilokasi tersebut tidak dimungkinkan lagi.

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Palembang Menurut Kecamatan Tahun 2012 - 2013

No	Kecamatan	Tahun		Laju Pertumbuhan (%)
		2012	2013	
1	2	3	4	5
1	ILIR BARAT II	64.779	64.635	-0,02
2	GANDUS	58.454	59.382	1,59
3	SEBERANG ULU I	165.475	168.510	1,83
4	KERTAPATI	81.956	81.790	-0,20
5	SEBERANG ULU II	93.525	94.910	1,48
6	PLAJU	80.688	80.006	-0,85
7	ILIR BARAT I	126.445	129.604	2,50
8	BUKIT KECIL	44.407	43.801	-1,36
9	ILIR TIMUR I	70.431	68.880	-2,20
10	KEMUNING	84.018	83.480	-0,64
11	ILIR TIMUR II	161.971	161.316	-0,40
12	KALIDONI	101.897	104.459	2,51
13	SAKO	84.195	86.132	2,30
14	SEMATANG BORANG	33.043	34.482	4,36
15	SUKARAMI	142.265	148.711	4,53
16	ALANG-ALANG LEBAR	88.265	93.387	5,80
	Jumlah	**1,455,284**	**1.503.485**	**1,46**

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2012-2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Secara umum pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan migrasi dinamakan faktor non alami. Migrasi ada dua yaitu migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk (imigrasi) dan yang dapat mengurangijumlah penduduk disebut migrasi keluar (emigrasi). Memerlukan kajian mendalam untuk mengetahui sebab bertambah atau berkurangnya penduduk di suatu wilayah.

https://palembangkota.bps.go.id

4.2 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin atau yang dikenal dengan istilah "*sex ratio*" menggambarkan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan, Rasio jenis kelamin lebih dari 100 berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, sebaliknya jika kurang dari 100 berarti penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Dari Tabel 4.2 kita dapat melihat *Sex Ratio* penduduk Kota Palembang tahun 2013 sebesar 100,19, ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa pada tahun 2013 hanya ada 4 kecamatan di Kota Palembang yaitu Ilir Timur I, ilir Timur II, Kemuning, dan Alang-alang Lebar yang memiliki rasio jenis kelamin kurang dari 100 artinya bahwa di kecamatan ini jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, dan kecamatan lainnya memiliki rasio jenis kelamin yang lebih dari 100, hal ini berarti penduduk di sebagian besar kecamatan di Kota Palembang memiliki

jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuannya.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ILIR BARAT II	32.534	32.101	64.635	101,35
2	GANDUS	30.187	29.195	59.382	103,40
3	SEBERANG ULU I	84.570	83.940	168.510	100,75
4	KERTAPATI	41.287	40.503	81.790	101,94
5	SEBERANG ULU II	47.569	47.341	94.910	100,48
6	PLAJU	40.317	39.689	80.006	101,58
7	ILIR BARAT I	65.147	64.457	129.604	101,07
8	BUKIT KECIL	22.001	21.800	43.801	100,92
9	ILIR TIMUR I	33.450	35.430	68.880	94,41
10	KEMUNING	41.182	42.298	83.480	97,36
11	ILIR TIMUR II	80.478	80.838	161.316	99,56
12	KALIDONI	52.271	52.188	104.459	100,16
13	SAKO	43.119	43.013	86.132	100,25
14	SEMATANG BORANG	17.392	17.090	34.482	101,76
15	SUKARAMI	74.387	74.325	148.711	100,08
16	AAL	46.569	46.818	93.387	99,47
	Jumlah	**752.460**	**751.025**	**1.503.485**	**100,19**

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

4.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu ciri Negara berkembang yaitu penyebaran penduduk yang tidak merata, di satu tempat yang luasnya relatif sempit dan kepadatannya tinggi, sedangkan di tempat lain yang luasnya cukup besar kepadatannya kurang. Kepadatan Kota Palembang sebesar 3.698,89 jiwa/km^2, melihat kepadatan kota Palembang yang cukup tinggi maka pemerintah Palembang perlu melakukan upaya untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk diantaranya menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran, menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi, menambahkan dan menciptakan lapangan kerja untuk menekan perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Dengan demikian diharapkan angka pertumbuhan penduduk Kota Palembang dapat ditekan lagi sehingga dapat setara atau lebih kecil dibandingkan angka pertumbuhan penduduk secara nasional.

https://palembangkota.bps.go.id

Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk adalah masalah kebutuhan perumahan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan serta masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, daerah kumuh dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Paling tidak pembangunan yang dilaksanakan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi dan masalah sosial lainnya.

Tabel 4.3.

Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kota Palembang

Menurut Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk per Km^2
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)
1	ILIR BARAT II	6,22	64.635	10.391
2	GANDUS	68,78	59.382	863
3	SEBERANG ULU I	17,44	168.510	9.662
4	KERTAPATI	42,56	81.790	1.922
5	SEBERANG ULU II	10,69	94.910	8.878
6	PLAJU	15,17	80.006	5.274
7	ILIR BARAT I	19,77	129.604	6.556
8	BUKIT KECIL	9,92	43.801	4.415
9	ILIR TIMUR I	6,5	68.880	10.597
10	KEMUNING	9	83.480	9.276
11	ILIR TIMUR II	25,58	161.316	6.306
12	KALIDONI	27,92	104.459	3.741
13	SAKO	18,04	86.132	4.775
14	SEMATANG BORANG	51,45	34.482	670
15	SUKARAMI	36,98	148.711	4.021
16	ALANG-ALANG LEBAR	34,58	93.387	2.701
	Jumlah	**400,61**	**1.503.485**	**3.753**

Sumber: Proyeksi Penduduk Tahun 2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Data kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat dengan cara membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah masing-masing daerah. Pada Tabel 4.3, dari 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.597 orang per km^2. Kepadatan penduduk di Kecamatan Ilir Timur I lebih tinggi dari Kepadatan Kota Palembang secara keseluruhan. Hal ini memperkuat analisis sebelumnya

ketika laju pertumbuhan penduduk terendah di Kota Palembang terjadi diwilayah ini, dimana salah satu dugaannya adalah wilayah ini sudah "jenuh". Kejenuhan ini terjadi salah satunya diakibatkan oleh padatnya jumlah penduduk diarea yang sempit dikawasan pusat kota dan pusat perekonomian.

Sedangkan Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Kota Palembang adalah Kecamatan Sematang Borang, yaitu sebesar 670 orang per km^2.

4.4 Struktur Umur

Dalam analisis kependudukan, perubahan demografis yang selalu mendapat perhatian adalah perubahan struktur umur. Perubahan struktur umur ini umumnya merupakan akibat penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas. Proporsi penduduk yang berumur muda akan mengalami penurunan, sebaliknya proporsi penduduk yang berumur tua akan mengalami peningkatan.

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Palembang tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4.4. Jumlah balita (penduduk di bawah lima tahun) cukup besar mencapai 145.958 orang, dimana balita laki-laki sebanyak 74.744 orang dan balita perempuan sebanyak 71.214 orang. Angka balita yang tinggi harus menjadi perhatian pemerintah sekarang dan periode mendatang, artinya dari mulai sekarang perlu dipersiapkan berbagai fasilitas terutama yang menyangkut bidang pendidikan dan kesehatan serta berbagai "bonus demografi" lainnya.

Struktur umur juga dapat melihat tingkat/rasio ketergantungan di suatu daerah. Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah orang yang tidak aktif

https://palembangkota.bps.go.id

secara ekonomi per 100 penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara sederhana biasanya menggunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Tingginya rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk bekerja. Keluarga-keluarga dengan jumlah anak banyak cenderung tidak mampu menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah.

Pada tabel tersebut kita juga dapat melihat penyebaran penduduk berdasarkan struktur umur yang kurang seimbang, dimana penduduk yang produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun) dan (65+), yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya beban ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Hal ini sejalan dengan ciri penduduk negara berkembang dimana ciri-ciri penduduk umur muda lebih banyak dibanding umur tua yaitu $\geq$ 40 % penduduk berada antara kelompok umur 0 -14 tahun, $\leq$ 55 % penduduk antara kelompok umur 15-64 tahun dan $\leq$ 5 % penduduk berada pada kelompok umur 65 keatas.

Cara lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan struktur penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Bentuk piramida penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur serta perpindahan penduduk.

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	74.744	71.214	145.958
5-9	70.448	66.149	136.597
10-14	67.658	63.111	130.769
15-19	67.520	67.594	135.114
20-24	74.301	76.629	150.930
25-29	75.139	74.031	149.170
30-34	65.399	62.955	128.354
35-39	54.885	55.030	109.915
40-44	48.471	50.545	99.016
45-49	42.649	45.192	87.841
50-54	37.300	38.329	75.629
55-59	29.858	28.576	58.434
60-64	18.479	18.496	36.975
65-69	11.126	12.858	23.984
70-74	7.644	9.361	17.005
75-79	6.839	10.955	17.794
80+	752.460	751.025	1.503.485
Jumlah	**74.744**	**71.214**	**145.958**

Sumber: Proyeksi Penduduk Tahun 2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Tingkat kelahiran penduduk tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang ukuran alasnya besar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Tingkat kelahiran yang rendah ditandai oleh bentuk piramida

dengan alas tidak begitu besar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup dan tingkat perpindahan penduduk pada setiap kelompok umur akan mempengaruhi fluktuasi dalam piramida.

Gambar 4.1.
Piramida Penduduk
Kota Palembang Tahun 2013 (Jiwa)

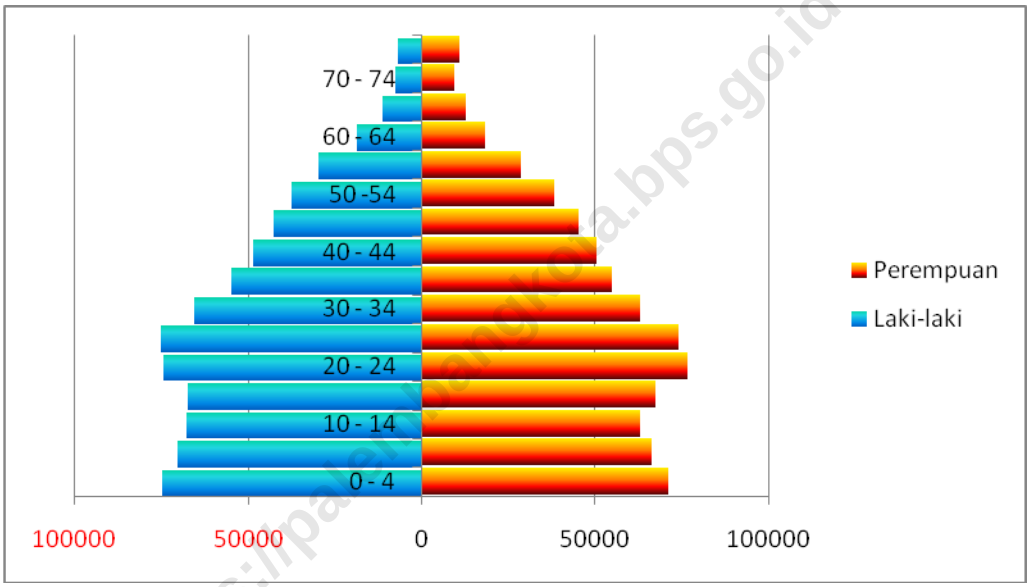

Sumber: Proyeksi Penduduk Tahun 2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Gambar 4.1. memperlihatkan bentuk piramida penduduk Kota Palembang tahun 2013. Struktur umur penduduk Kota Palembang dalam piramida tersebut menunjukkan mulai adanya pergeseran kelompok umur muda ke kelompok umur menengah. Hal ini dapat terlihat pada kelompok umur 20-24 tahun baik laki-laki maupun perempuan memiliki grafik yang paling tinggi.

Kondisi ini cukup mengembirakan karena proporsi penduduk produktif yang lebih besar tentunya akan mengurangi jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif atau dengan kata lain angka

Dependency Ratio Kota Palembang akan semakin rendah. Sedangkan dari sisi perekonomian, semakin banyak penduduk produktif di suatu wilayah akan mendorong roda perekonomian suatu wilayah bergerak lebih cepat.

https://palembangkota.bps.go.id

K E S E H A T A N

BAB V

Salah satu hak asasi manusia adalah mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan kesinambungan perlindungan kesehatan. Melalui program-program pembangunan, baik berupa pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan perluasan jangkauan pelayanan sampai ke seluruh pelosok tanah air merupakan upaya pemerintah guna meningkatkan taraf kesehatan penduduk.

Sasaran pembangunan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah meningkatnya secara bermakna jumlah ibu hamil yang memeriksakan diri dan melahirkan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sehingga semakin tinggi cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin rendah risiko terjadinya kematian pada ibu dan anak, berbagai aspek kesehatan yang disajikan misalnya dapat dilihat dari siapa yang menolong dalam persalinan.

https://palembangkota.bps.go.id

5.1 FERTILITAS

Pengendalian penduduk dapat dilaksanakan dengan menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu menurunkan tingkat kelahiran (fertilitas). Selain itu guna meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya status dan derajat kesehatan masyarakat, dilakukanlah upaya menurunkan angka kematian anak, ini karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Penurunan fertilitas merupakan program pemerintah yang terus dilakukan dalam mengantisipasi pertambahan penduduk. Pembatasan jumlah penduduk mutlak dibutuhkan terutama dalam menjaga keseimbangan penduduk. Faktor-faktor demografis seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, keterjadian banyaknya perkawinan, lamanya perkawinan dan banyaknya kelahiran anak sebelumnya dapat mempengaruhi fertilitas. Selain itu, perubahan fertilitas tinggi ke fertilitas rendah juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi penduduk seperti pendidikan, pendapatan, agama dan tata nilai yang berlaku pada suatu komunitas.

Ukuran fertilitas yang dipakai dan disajikan dalam publikasi ini adalah rata-rata anak lahir hidup (ALH) menurut kelompok umur ibu, selain itu juga dibahas indikator yang dapat menggambarkan tingkat fertilitas, yaitu rata-rata umur perkawinan pertama wanita (SMAM).

https://palembangkota.bps.go.id

5.1.1. Anak Lahir Hidup (ALH)

Anak Lahir Hidup (paritas) adalah ukuran fertilitas dari satu kohor yang mengukur jumlah anak terlahir hidup oleh wanita dari kelompok umur yang berbeda-beda sampai dengan waktu pencacahan. Paritas dapat dikategorikan menurut umur wanita, status perkawinan, daerah, dan lain-lain. Paritas ini juga dapat diartikan bahwa semakin cepat seorang wanita melangsungkan pernikahan pertama mereka maka akan semakin panjang juga masa reproduksinya dan tentunya akan semakin besar pula seorang wanita untuk melahirkan seorang anak.

Tabel 5.1
Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) Per Wanita Menurut Kelompok Umur
Kota Palembang Tahun 2013

Tahun	Kelompok Umur							Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2008	0,044	0,342	0,761	1,868	2,709	3,637	4,552	1,653
2009	0,006	0,324	1,024	1,947	2,482	2,942	3,745	1,51
2010	0,05	0,362	1,139	1,6	2,47	2,972	3,474	1,536
2011	0,033	0,333	1,03	1,994	2,439	2,867	3,719	1,555
2012	0,019	0,274	1,018	1,777	2,614	2,673	3,503	1,497
2013								

Sumber: Susenas 2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Jumlah anak yang dilahirkan juga menandakan apakah program KB yang di canangkan oleh pemerintah berhasil atau tidak, Pada Tabel 5.1 menunjukkan rata-rata anak lahir hidup pada setiap wanita menurut kelompok umur di Kota Palembang Tahun 2013. Rata-rata anak lahir hidup dari setiap wanita usia subur terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2008 rata-rata anak lahir hidup pada setiap perempuan usia subur adalah sebanyak 1,65 anak. Angka ini menurun menjadi 1,49 anak per wanita usia subur pada tahun 2013.

Pada Tabel 5.1 juga menunjukkan, pada akhir masa usia subur wanita di Kota Palembang pada tahun 2013, kecenderungan jumlah anak lahir hidup cenderung menurun. Pada kelompok usia 40-44 tahun, pada tahun 2008 jumlah rata-rata anak lahir hidup adalah 3,63, dan terus menurun menjadi 2,67 pada tahun 2013.

Angka-angka diatas secara umum menunjukkan terjadinya penurunan angka kelahiran bayi, yang dapat dimaknai dari dua sisi yang pertama adalah

adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki anak tidak lebih dari 3 (tiga) orang semakin tinggi. Kedua adalah keberhasilan promosi kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB) yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang cukup berhasil. Selain itu peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber-KB juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi perekonomian.

5.1.2 Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

Untuk melihat telah terjadi pendewasaan usia perkawinan adalah dengan melihat umur perkawinan pertama. Dalam sajian ini analisis akan dibatasi pada penduduk perempuan, sebab umur perkawinan pertama perempuan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu unsur pertumbuhan penduduk. Usia kawin pertama yang dilakukan oleh setiap wanita memiliki resiko terhadap kehamilan dan persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seorang wanita, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak. Hal ini terjadi dikarenakan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak atau belum siap mental dalam berumah tangga. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia kawin pertama seorang wanita, semakin tinggi pula resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan atau melahirkan. Hal ini terjadi karena semakin lemahnya kondisi fisik seorang wanita menjelang usia senja.

Rata-rata umur perkawinan pertama ini merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat fertilitas di suatu daerah. Semakin muda seseorang melakukan perkawinan semakin panjang masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang akan lebih banyak anak dilahirkan. Di Kota Palembang usia perkawinan pertama didominasi usia 19-24 tahun, hal ini tentunya dunia

https://palembangkota.bps.go.id

pendidikan memberikan kontribusi yang besar. Artinya dari tahun ke tahun pola pikir masyarakat Kota Palembang kian menunjukan arah positif, akan pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya, selain itu banyak pula yang menunda usia pertama perkawinan mereka untuk mengejar karier terlebih dahulu.

Tabel 5.2
Persentase Penduduk Perempuan 10 Tahun Keatas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2011 dan 2013

Umur Perkawinan Pertama	Persentase	
	2011	2013
(1)	(2)	(3)
<16	12.6	11.30
17-18	17.0	13.94
19-24	48.0	49.51
25+	22.5	25.25
Jumlah	100	100

Sumber : Susenas 2011 dan 2013

https://palembangkota.bps.go.id

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa ada kecenderungan kenaikan umur perkawinan pertama untuk kelompok usia 19-24, dan 25+ dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya ada kecenderungan penurunan umur perkawinan pertama untuk kelompok usia < 16 tahun dari tahun 2011 ke tahun 2013 walaupun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, yaitu dari 12,6 persen pada tahun 2011 menjadi 11,30 persen pada tahun 2013. Penurunan jumlah umur perkawinan pertama secara signifikan terjad pada kelompok usia wanita 17-18 tahun yaitu dari

17 persen pada tahun 2011, menjadi 13,94 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadarn masyarakat akan arti penting kesehatan reproduksi yang salah satunya adalah dengan tidak menikah di usia dini, sehingga masa reproduksi mereka menjadi lebih pendek. Alasan lain adalah indikasi keberhasilan berbagai program terkait seperti pendidikan gratis yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang pernikahan.

5.1.3 Status Perkawinan

Pengertian "Kawin" dalam perspektif statistik, dalam hal ini istilah perkawinan lebih difokuskan pada keadaan dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama yang dikukuhkan dengan perkawinan yang sah sesuai UU atau hukum yang ada (perkawinan secara de jure) atau tanpa pengesahan perkawinan (de facto).

BPS sendiri sejak tahun 2000 menggunakan definisi bahwa seseorang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang hidup bersama yang oleh masyakarat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri. Pada tahun 2010 terdapat Penduduk Belum Kawin 43,1 persen laki-laki; 34,7 persen perempuan, yang Berstatus Kawin 55 persen laki-laki; 55,5 persen perempuan, Cerai Hidup 0,70 persen laki-laki 1,4 persen perempuan dan Cerai Mati 1,2 persen laki-laki; 8,5 persen perempuan. Pada tahun 2013 42,4 persen laki-laki; 35,3 persen perempuan, yang Berstatus Kawin 55,9 persen laki-laki; 55 persen perempuan, Cerai Hidup 0,2 persen laki-laki 1,5 persen perempuan dan Cerai Mati 1,5 persen laki-laki; 8,2 persen perempuan. (tabel 5.3)

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 5.3
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 dan 2013

Status Perkawinan	Persentase			
	2011		2013	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belum Kawin	43.1	34.7	42.4	35.3
Kawin	55.0	55.5	55.9	55
Cerai Hidup	0.7	1.4	0.2	1.5
Cerai Mati	1.2	8.3	1.5	8.2
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Susenas 2011 dan 2013

https://palembangkota.bps.go.id

Jika kita melihat selama tahun 2011-2013 berdasarkan jenis kelamin tampaknya di Kota Palembang sama dengan di kota besar lainnya lebih banyak laki-laki yang belum kawin dibandingkan dengan penduduk perempuan. Proporsi laki-laki lebih banyak belum kawin daripada perempuan diduga disebabkan persepsi dan preferensi masyarakat bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab secara ekonomi sehingga partisipasinya dalam dunia kerja dan sekolah lebih tinggi, sehingga mereka lebih cenderung menunda perkawinan.

Menarik untuk memperhatikan pola variasi penduduk yang berstatus cerai hidup dan cerai mati. Pengertian cerai hidup dalam perspektif statistik adalah "tidak hanya mereka yang mengaku bercerai walaupun belum resmi secara hukum, juga termasuk wanita yang belum pernah kawin tetapi pernah hamil", sedangkan cerai mati berkaitan dengan kematian salah satu pasangan hidup.

Tabel 5.3 menunjukkan angka cerai hidup dan cerai mati perempuan lebih

tinggi di bandingkan laki-laki, dari berbagai penelitian yang banyak dilakukan mengungkapkan status cerai hidup disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor ajaran agama yang dianut, faktor ekonomi dan pendidikan. Kenyataan lain bahwa jumlah penduduk perempuan berstatus cerai lebih banyak dibandingkan laki-laki, baik berstatus cerai hidup maupun cerai mati ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan lebih bisa bertahan hidup sendiri (menjanda) dibandingkan laki-laki, serta kenyataan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

https://palembangkota.bps.go.id

5.2 KESEHATAN BALITA

Aspek penting pembangunan kesehatan berkaitan dengan upaya kesehatan balita, karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik mental maupun fisik sangat ditentukan oleh pola prilaku sehat seorang ibu, terutama saat hamil, melahirkan dan perawatan bayi dan balita. Melalui kualitas kesehatan balita yang baik akan mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat.

5.2.1 Penolong Kelahiran

Dalam peristiwa persalinan biasanya seorang wanita akan menentukan sendiri siapa yang akan menolongnya apakah tenaga medis atau bukan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga nonmedis (dukun, keluarga ataupun sendiri) yang merupakan tenaga yang tidak terlatih bisa memperbesar risiko terjadinya komplikasi persalinan dibandingkan dengan persalinan yang ditolong dengan tenaga medis (doker, bidan dan tenaga medis lain). Hal ini disebabkan karena penolong persalinan yang tidak terlatih biasanya banyak melakukan manipulasi uterus secara berlebihan dalam proses persalinan dimana hal ini bisa

menyebabkan perdarahan persalinan (Kasdu, 2005) dan pada akhirnya juga akan memperbesar terjadinya kematian ibu.

Tabel 5.4
Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan
Kota Palembang Tahun 2009-2013

TAHUN	Penolong Persalinan					
	Dokter	Bidan	Nakes Lainnya	Dukun Bersalin	Famili /Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2009	33,01	63,73	0,33	2,29	0,65	100
2010	29,03	65,26	0,73	4,66	0,33	100
2011	28,72	68,63	-	2,65	-	100
2013	29,56	68,66	-	1	0,78	100

Sumber : Susenas 2009-2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 5.4 menunjukkan sebagian besar wanita di Kota Palembang lebih memilih tenaga medis bidan pada saat persalinannya dibandingkan tenaga medis lainnya (lebih dari 60 persen). Keadaan ini disebabkan keberadaan tenaga bidan yang ada disekitar tempat tinggal masyarakat. Selain itu biaya persalinan dengan tenaga bidan relatif lebih murah dibandingkan dengan tenaga dokter. Serta adanya hubungan yang akrab dan bersifat kekeluargaan dengan ibu-ibu yang ditolongnya, disamping itu semua adalah bidan mempunyai pendidikan mengenai kesehatan dalam hal persalinan dibandingkan dukun bayi atau tenaga non medis lainnya.

Peringkat kedua yang dipilih untuk penolong persalinan di Kota Palembang adalah Dokter. Meskipun cukup berfluktuasi secara tidak signifikan, hampir 30 (tiga puluh) persen wanita usia subur di Kota Palembang memilih tenaga dokter dalam proses persalinan anaknya. Hal ini diduga disebabkan secara

profesi tenaga dokter dianggap lebih ahli dari tenaga medis maupun non medis lainnya dalam proses persalinan. Selain itu keberadaan tenaga dokter di Kota Palembang cukup memadai, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Sementara itu, untuk penolong persalinan non medis seperti dukun bersalin di Kota Palembang terus mengalami penurunan, yaitu 2.29 persen pada tahun 2009 dan menurun menjadi 1 persen pada tahun 2013. Hal ini diduga disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting resiko persalinan yang tidak steril, serta keberadaan dukun bersalin yang semakin langka di kota ini.

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melahirkan dengan bantuan tenaga medis yang sudah berpengalaman dan mendapatkan pendidikan khusus mengenai kebidanan semakin baik.

https://palembangkota.bps.go.id

Gambar 5.1. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kota Palembang Tahun 2013

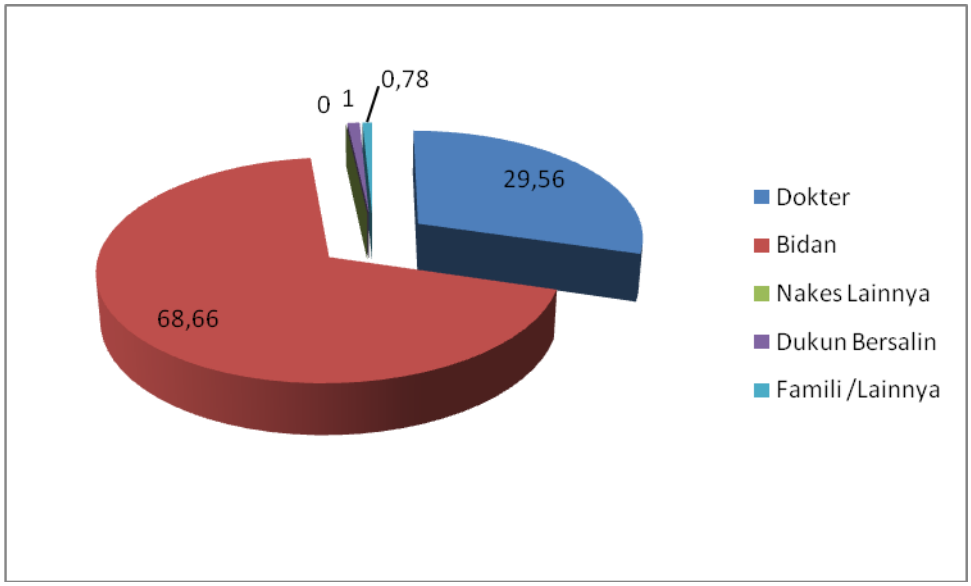

Sumber : Susenas 2013

Gambar 5.1 menunjukkan hanya 1 persen proses kelahiran balita di Kota Palembang yang ditangani oleh dukun bersalin. Bahkan lebih dari seperempat proses kelahiran balita sudah ditangani tenaga dokter (29,56 persen) dan sisanya sudah ditangani bidan/paramedis (68, 66 persen) . Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan persalinan ibu hamil. Sehingga angka kematian ibu dan bayi pada saat melairkan akan semakin rendah.

5.2.2 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) juga hal yang cukup menarik untuk dibicarakan, ASI (Air Susu Ibu) adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi, karena ASI tidak saja penting bagi kesehatan ibu dan bayinya, tetapi juga berbagai penelitian mengungkapkan Ibu yang menyusui anaknya dengan baik dan benar yaitu sampai anaknya berusia 24 bulan, secara tidak langsung telah mengatur (menjarangkan) kelahiran anak-anaknya.

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 5.5
Rata-rata Lama Balita Usia 1-4 tahun mendapatkan ASI dan Persentase Balita Usia 1-4 tahun mendapatkan ASI Esklusif di Kota Palembang 2008-2013

Tahun	Rata-rata Lama ASI (Bulan)	% ASI Esklusif
(1)	(2)	(3)
2008	18,26	33,81
2009	15,58	30,86
2010	16,95	27,33
2011	17,57	35,87
2012	17,26	37,35

Sumber: Susenas 2013

https://palembangkota.bps.go.id

Hasil Susenas 2013 yang disajikan pada Tabel 5.5 menunjukkan rata-rata lama balita usia 1-4 tahun mendapatkan air susu ibu (ASI) dari tahun 2008 sampai dengan 2013 di Kota Palembang. Angka rata-rata lama bayi disusui yang berfluktuasi diantara 15 sampai dengan 18 bulan menunjukkan sebagian besar bayi usia 1-4 tahun di Kota Palembang masih mendapatkan ASI, paling tidak sampai dengan usia 1,5 tahun. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat ASI merupakan salah satu sumber pokok makanan bagi bayi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi (antibodi) dari serangan berbagai macam penyakit.

Rata-rata lama bayi mendapatkan ASI yang cukup tinggi belum cukup, tanpa melihat kualitas pemberiannya. Pemberian ASI yang berkualitas adalah pada 6 bulan pertama dari kelahiran tanpa terputus, yang sering disebut ASI Esklusif. Pada masa ini kualitas ASI ibu melahirkan sangat baik, sehingga pemberian secara terus menerus akan menimbulkan efek yang baik bagi tumbuh kembang anak dimasa datang.

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa lebih dari 30 (tiga puluh) persen bayi di Kota Paelmbang telah mendapatkan ASI Esklusif. Bahkan di tahun 2013 angka bayi penerima ASI esklusif meningkat hingga 37.35 persen. Kondisi ini tentunya cukup menggembirakan, walaupun masih 60 (enam puluh) persen lebih bayi di Kota Paelmbang belum mendapatkan ASI esklusif dengan berbagai alasan. Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran ibu di Kota Palembang untuk memberikan ASI kepada bayinya sudah meningkat.

https://palembangkota.bps.go.id

5.3 STATUS KESEHATAN

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk saat waktu tertentu dimana dalam Susenas dicatat selama sebulan sebelum pencacahan. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Sebagai contoh pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan (pekerja sehat) akan dapat bekerja dengan jam kerja lebih lama dan bekerja lebih optimal.

Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan dan rata-rata lama sakit.

5.3.1 Angka Kesakitan

Salah satu cara untuk melihat keberhasilan program kesehatan masyarakat melalui angka kesakitan. Masyarakat sehat adalah masyarakat yang relatif rendah kemungkinannya terserang penyakit atau dengan memiliki angka kesakitan rendah. Angka kesakitan sendiri menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan suatu periode tertentu.

Tabel 5.6

Angka Kesakitan Penduduk Kota Palembang Tahun 2008-2013

Tahun	Angka Kesakitan
(1)	(2)
2008	49.44
2009	44.86
2010	34.52
2011	37.81
2012	32.52

Sumber: Susenas 2008-2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Pada Tabel 5.7 terlihat bahwa angka kesakitan penduduk Kota Palembang terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk Kota Paelmbang mencapai 49,44 persen, angka ini terus menurun menjadi 32, 52 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Palembang, yang diduga disebabkan oleh meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta berbagai program kesehatan gratis yang diselengarakan oleh Pemerintah Kota Paelmbang, sehingga masyarakat mampu dan mau mengakses pelayanan kesehatan di unit-unit kesehatan yang ada.

5.3.2 Rata-rata Lama Sakit

Berdasarkan hasil data Susenas 2013 diketahui bahwa rata-rata lama sakit penduduk Kota Palembang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan (Tabel 5.7). Pada tahun 2008, rata-rata lama sakit penduduk Kota Palembang adalah 5,25

hari atau 5 sampai dengan 6 hari. Angka rata-rata lama sakit in terus mengalami penurunan hingga 4,95 hari pada tahun 2013. Artinya rata-rata lama sakit penduduk Kota Palembang pada tahun 2013 adalah 4 sampai dengan 5 hari. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Palembang.

Tabel 5.7

Rata-rata Lama Sakit di Kota Palembang Tahun 2008- 2013

Tahun	Rata – rata Lama Sakit (hari)
(1)	(2)
2008	5,25
2009	5,03
2010	4,69
2011	5,09
2013	4,95

Sumber: Susenas 2013

https://palembangkota.bps.go.id

5.4 PEMANFAATAN FASILITAS KESEHATAN

Upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat harus dibarengi dengan upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Meskipun Kota Palembang telah mengalami banyak kemajuan sebagai hasil pembangunan,seperti halnya dalam hal pembangunan kesehatan. Namun pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pengadaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan, seperti puskesmas dan pengadaan tenaga kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil.

Tabel 5.8
Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan Kota Palembang 2008 - 2013

Jenis Fasilitas Kesehatan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RS Pemerintah	5,77	5,8	11,79	5,62	10,9
RS Swasta	6,29	8,58	7,96	5,27	10,07
Praktek Dokter/ Poliklinik	39,05	41,06	43,65	37,94	36,47
Puskes mas/ Pustu	41,66	29,47	28,56	34,55	27,66
Praktek Nakes	7,95	12,53	4,31	9,31	7,94
Praktek Batra	1,32	1,04	0,68	1,22	1,9
Dukun Bersalin	0,14	0,7	-	0,86	0,47
Lainnya	4,56	0,81	3,05	5,23	4,59

Sumber: Susenas 2008-2013, BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Sejauh mana pengadaan berbagai fasilitas kesehatan telah mampu menjangkau seluruh masyarakat, bisa dilihat melalui beberapa ukuran atau rasio antara jumlah fasilitas kesehatan yang ada dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Keterbatasan sarana kesehatan yang ada, masih relatif sulitnya akses sebagian masyarakat pada sarana yang tersedia serta kesadaran kesehatan masyarakat yang rendah berdampak rendahnya kunjungan masyarakat pada sarana kesehatan. Tabel 5.9 memberikan informasi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan kunjungan ke tempat fasilitas kesehatan, dari tabel tersebut didapat ternyata di Palembang penduduknya lebih banyak mengunjungi praktek dokter dan puskesmas/pustu, dari hasil diatas didapat bahwa persentase jumlah kunjungan ke fasilitas dokter sebanyak 49,37 persen untuk puskesmas sebesar 39 persen.

5.4 PENGGUNAAN ALAT KB

Program keluarga berencana (KB) berperan penting dalam membatasi kelahiran dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program KB di Kota Palembang dapat dilihat pada Tabel 5.9 yang menjelaskan persentase penduduk perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun keatas yang menggunakan alat KB. Secara umum, persentase penggunaan alat KB oleh penduduk yang aktif secara reproduksi dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan, pada tahun 2008 jumlah pengguna KB sebesar 52,94 persen dan hingga tahun 2013 angka tersebut berfluktuasi menjadi sebesar 51,76 persen.

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 5.9
Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Keatas Yang Menggunakan Alat KB Tahun 2008-2013

Tahun	Persentase
(1)	(2)
2008	52.94
2009	53.36
2010	52.81
2011	54.70
2012	51.76
Jumlah	**100**

Sumber : Susenas 2008-2013

Secara umum tampaknya pasangan usia subur di Kota Palembang (berusia 15-49 tahun), menjatuhkan pilihannya pada alat kontrasepsi suntikan. Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa jenis alat KB suntikan yang paling diminati yaitu sebesar 60,39 persen. Peringkat kedua yang banyak diminati oleh pasangan usia subur

adalah Pil KB yaitu sebesar 20,42 persen, dilanjutkan jenis AKD/IUD/Spiral oleh kamu wanita sebesar 4,85 persen dan Susuk KB sebesar 4.80 persen. Faktor ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat akan keluarga kecil bahagia dan sejahtera sudah semakin tinggi.

Tabel 5.10
Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Keatas Menurut Jenis Pemakaian Alat KB Tahun 2013

Alat/ Cara KB yang Sedang digunakan	2013
(1)	(2)
MOW/ Tubektomi	2.39
MOP /Vasektomi	0.62
AKDR/IUD/Spiral	4.85
Suntikan KB	60.39
Susuk KB	4.80
Pil KB	20.42
Kondom/Karet KB	2.08
Intervag/Tisue	-
Cara Tradisional	4.46
Jumlah	100

Sumber : Susenas 2013

https://palembangkota.bps.go.id

P E N D I D I K A N

BAB VI

Pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Karena itu, manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, dengan mengutamakan mutu, efektivitas dan efisiensi.

https://palembangkota.bps.go.id

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi rakyat seluruhnya, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Untuk itu, pendidikan memerlukan pegangan dan pedoman ke arah mana masyarakat akan bergerak. Pandangan dan sikap hidup apa yang dikehendaki masyarakat

dalam perjuangannya mencapai tujuannya. Hal ini berpengaruh kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan pembangunan pendidikan di Kota Palembang, pada bab ini akan diuraikan mengenai keadaan pendidikan penduduk Kota Palembang dalam perspektif statistik beberapa ukuran yang merupakan indikator keadaan pendidikan, diantaranya angka partisipasi sekolah, partisipasi tingkat pendidikan yang sedang diikuti, kemampuan baca tulis suatu huruf, yang dikenal dengan angka melek huruf. Dalam bahasan ini difokuskan pada aspek-aspek pendukung kegiatan pendidikan juga kecenderungan pendidikan laki-laki dan perempuan.

https://palembangkota.bps.go.id

6.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk bersekolah lewat suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 6.1. menunjukkan bahwa APK Sekolah Dasar di Kota Palembang tahun 2013 mencapai angka 102.21. Hal ini karena banyaknya anak usia 5-6 tahun yang memasuki pendidikan SD, juga adanya penduduk berusia diatas 12 tahun yang masih melakukan pendidikan di SD, sehingga banyaknya penduduk yang masih bersekolah di SD jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Untuk jenjang SLTP, APK sebesar 105.86. Hal ini disebabkan banyaknya anak usia dibawa 13-15 tahun yang sudah memasuki jenjang SLTP. Sedangkan angka partisipasi kasar untuk jenjang SMU sebesar 73.30.

Tabel 6.1

Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan

dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
APK SD (7-12)	106.40	98.02	102.21
APK SLTP (13-15)	96.91	114.75	105.86
APK SLTA (16-18)	77.39	69.01	73.30

Sumber : Susenas 2011

https://palembangkota.bps.go.id

6.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibanding dengan angka partisipasi kasar (APK). Karena APM merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SLTP dan 16-18 untuk SMU).

Dari Tabel 6.2. dapat dilihat bahwa APM untuk sekolah Dasar sebesar 87.62 artinya dari jumlah anak usia 7-12 tahun sebanyak 87.62% masih bersekolah di SD. Sedangkan APM untuk tingkat SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 67.84 dan 50.98.

Tabel. 6.2
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Palembang Tahun 2013

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	89,49	85,74	87,62
SLTP	63,36	72,28	67,84
SMA	51,25	50,70	50,98

Sumber : Susenas 2013

https://palembangkota.bps.go.id

6.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Seseorang yang berusia 7–24 tahun merupakan seseorang yang dianggap mapan dalam suatu proses belajar mengajar. Pada awal pembangunan pemerintah menetapkan usia 7–12 tahun sebagai usia pendidikan dasar. Akhir-akhir ini, usia pendidikan dasar berubah menjadi 7–15 tahun. Hal ini untuk mengantisipasi program pendidikan dasar sembilan tahun, dampak positif yang diharapkan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat.

Pada Tabel 6.3 dapat dilihat penduduk usia 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Secara umum Tabel 6.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terjadi pergeseran tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Kota Palembang, dari tingkat SLTP ke bawah menjadi tingkat SLTA keatas. Artinya berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah guna mendorong dunia pendidikan dari sisi ini cukup berhasil.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6.3 bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang tidak punya ijazah mengalami pergeseran daro 16.61 persen

pada tahun 2008 menjadi 10.51 persen pada tahun 2013. Begitu pula pada tingkat pendidikan SD/Sederajat dimana pada tahun 2008 penduduk yang berijazah SD mencapai 17.65 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 15.84 persen. Begitupula pada penduduk tamatan SLTP/ Sederajat yang pada tahun 2008 berjumlah 19.02 persen menjadi 18.02 persen pada tahun 2013.

Sebaliknya pada penduduk tamatan SLTA/Sederajat terjadi kenaikan dari tahun 2008 sebesar 34.67 persen menjadi 40.32 persen pada tahun 2013. Begitupula pada lulusan Perguruan tinggi yang pada tahun 2008 sebesar 12.05 persen dan menjadi 15.31 persen pada tahun 2013.

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 6.3
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Kota Palembang Tahun 2008-2013

Tahun	Tingkat Pendidikan					
	Tidak Punya Ijazah	SD /Sederajat	SLTP /Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	16,61	17,65	19,02	34,67	12,05	100
2009	15.57	16.16	19.46	37.19	11.62	100
2010	13,68	17,29	18,92	34,74	15,37	100
2011	14,48	16,5	20,33	35,92	12,76	100
2012	10,51	15,84	18,02	40,32	15,31	100

Sumber : Susenas 2008-2013

Pada Gambar 6.1 dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2013 di Kota Palembang, yang tidak/belum tamat SD sebesar 10.51 persen, yang menamatkan SD sebesar 15.84 persen, yang menamatkan SLTP sebesar 18.02 persen, menamatkan SLTA sebesar 40.32

persen dan menamatkan D1/Perguruan tinggi sebesar 15.31 persen.

Gambar 6.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Palembang Tahun 2011

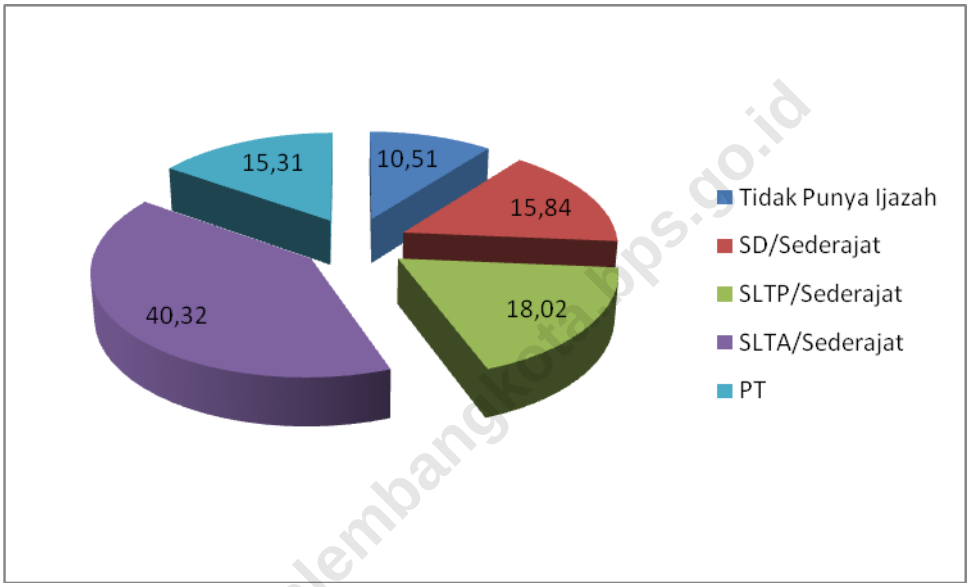

https://palembangkota.bps.go.id

6.4 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah (*Years Means School*) merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan oleh pemerintah dalam menghitung Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan yang mampu dicapai oleh masyarakat disuatu wilayah,dalam hal ini wilayah Kota Palembang. Rata-rata lam sekolah di Kota Palembang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada Tabel 6.4 dapat dilihat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Palembang pada tahun 20102 adalah 10.39. Artinya rata-rata penduduk Kota Palembang telah mengenyam pendidikan SLTA kelas 1 (Tingkat X). Secara gender, rata-rata lama sekolah lak-

laki di Kota Palembang pada tahun 2013 lebih tinggi dari perempuan, walaupun tidak signifikan.

Tabel 6.4
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Kota Palembang Tahun 2008-2013

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	10,19	9,61	9,9
2009	10,27	9,66	9,95
2010	10,24	9,68	9,96
2011	10,2	9,74	9,98
2012	10,56	10,22	10,39

Sumber : Susenas 2008-2013

https://palembangkota.bps.go.id

6.5 Angka Melek Huruf

Pada tingkat makro, ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar. Sehingga dapat dikatakan kemampuan baca tulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera.

Bahasan ini yang juga dijadikan barometer dalam mengukur tingkat keberhasilan pendidikan suatu daerah adalah angka melek huruf. Angka melek huruf didefinisikan sebagai presentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huuf latin/huruf lainnya, di mana angka idealnya

adalah 100 persen.

Tabel 6.5
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Kota Palembang Tahun 2008-2013

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	99,22	97,6	98,39
2009	99,56	97,92	98,69
2010	98,68	98,26	98,47
2011	98,79	95,87	97,34
2012	99,58	98,31	98,94

Sumber : Susenas 2008-2013

https://palembangkota.bps.go.id

Pada Tabel 6.5 dapat disimpulkan bahwa angka melek huruf penduduk Kota Palembang terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2013 Angka melek huruf di Kota Palembang mencapai 98.94 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2011) yaitu sebesar 97.34 persen. Secara gender, pada tahun 2013 di Kota Palembang angka melek huruf laki-laki (99.58 persen) lebih baik dari angka melek huruf perempuan (98.31 persen).

KETENAGAKERJAAN

BAB VII

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta proses globalisasi yang amat pesat, telah membawa berbagai perubahan yang mendasar dalam segala aspek kehidupan. Proses transformasi struktural dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang dijalani sekarang ini menuntut adanya penyesuaian, baik dalam kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap mental, disiplin dan etos kerja bangsa.

Di dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dalam perluasan kesempatan kerja (pria dan wanita). Perkembangan kesempatan kerja pada kenyataannya lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja. Lowongan kerja yang tersedia tidak mampu mengikuti perkembangan angkatan kerja sehingga akan menimbulkan pengangguran dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dan dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

https://palembangkota.bps.go.id

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Sebelum kita membicarakan masalah ketenagakerjaan ada baiknya kita memahami terlebih dahulu konsep-konsep ketenagakerjaan dalam perspektif BPS. Pengertian pertama, Angkatan Kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam status bekerja atau sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau dengan kata lain penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan ekonomis. Penduduk berusia 65 tahun ke atas (lanjut usia) yang tidak mampu melakukan pekerjaan lagi, kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang lain atau sebaliknya penduduk berumur kurang dari 15 tahun meskipun telah melakukan pekerjaan secara langsung atau tidak langsung guna memenuhi/membantu kebutuhan hidup tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja (Bukan Angkatan Kerja).

https://palembangkota.bps.go.id

Konsep yang kedua, Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu, bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus dan yang dimaksud dengan punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok. Bahasan

ketenagakerjaan akan melihat kegiatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan utama, jenis pekerjaan utama, dan jumlah jam kerja seluruh pekerjaan, untuk lebih jelasnya akan disajikan diagram tentang konsep ketenagakerjaan sebagai berikut ini.

Gambar 7.1.

Konsep Ketenagakerjaan

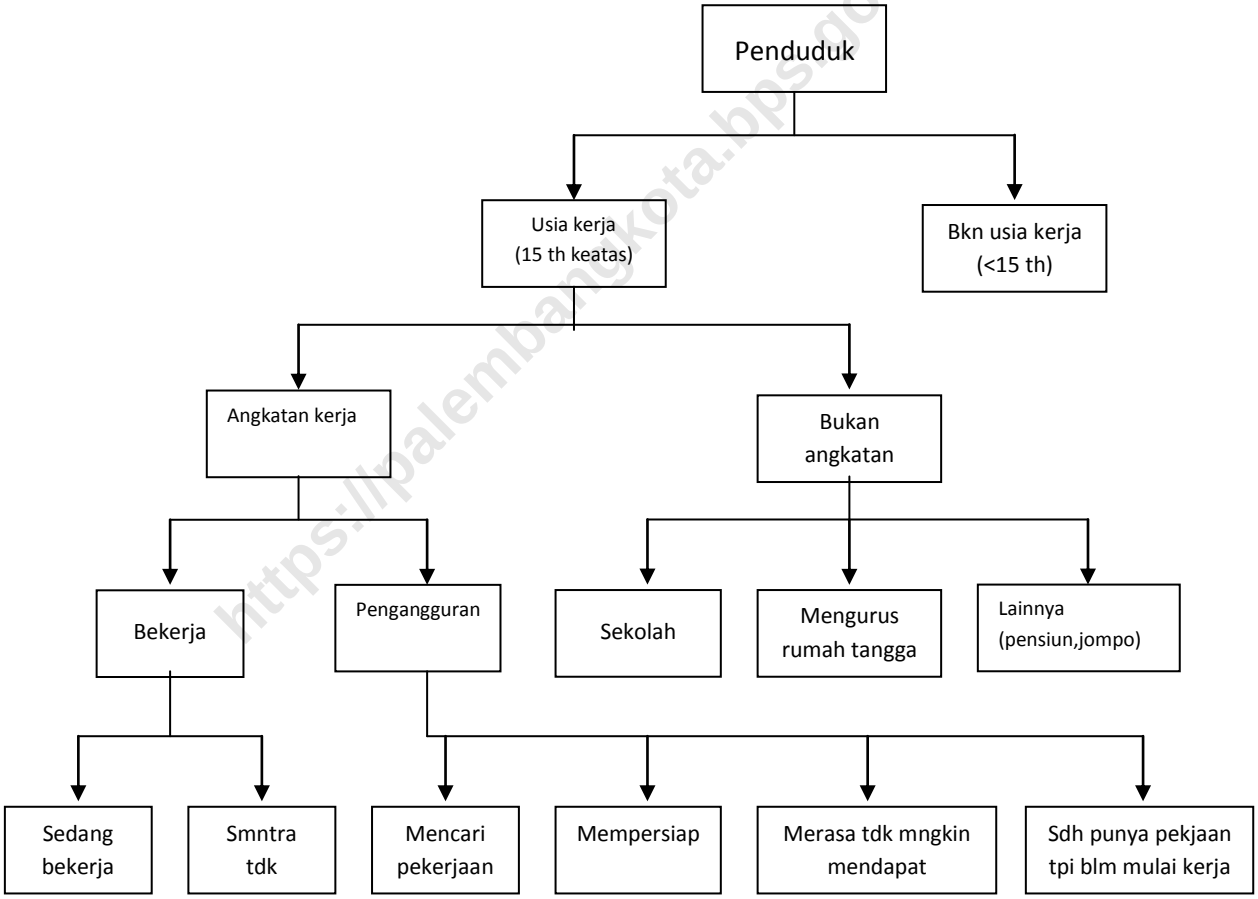

https://palembangkota.bps.go.id

7.1. Angkatan Kerja dan TPAK

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan

kecenderungan tenaga kerja agar aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

. Dari tabel 7.1 dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan walaupun ini tidak terlalu signifikan yaitu dari 64.82 persen menjadi 60.28 persen, untuk laki-laki TPAK pada tahun 2012 sebesar 79.97 persen, untuk perempuan sebesar 49.72 persen dan pada tahun 2012 untuk laki-laki sebesar 76.17 persen dan untuk perempuan sebesar 44.55 persen.

Menurut (Simanjuntak, 1998) ada beberapa faktor yang menyebabkan TPAK meningkat diantaranya yaitu jumlah penduduk yang masih sekolah (semakin kecil jumlah penduduk yang bersekolah, semakin besar pula TPAK dilihat bahwa pada tahun 2012 penduduk yang bersekolah sebanyak 116.886 orang dan pada tahun 2013 berkurang menjadi 128.2002 orang, faktor yang kedua yaitu Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga bahwa semakin kecil anggota dalam tiap keluarga yang mengurus rumah tangga, semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja dilihat pada Tabel 7.1 terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk yang mengurus rumahtangga sebesar 206.028 jiwa dan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 234.934 jiwa

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 7.1
Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas dirinci Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2012 -2013

Kegiatan Utama	2012			2013		
	lk	Pr	total	Lk	pr	total
1	2	3	4	5	6	7
Angkatan Lerja						
Bekerja	391,835	227,682	619,517	370547	208926	579473
Pengangguran	32,395	36,827	69,222	34349	30498	64847
Jumlah	424,23	264,509	688,739	404896	239424	644320
Bukan Angkatan Kerja						
Sekolah	57,917	58,949	116,866	68582	59620	128202
Mengurus Rumah Tangga	12,355	193,673	206,028	8323	226611	234934
Lainnya	35,973	14,844	50,817	49754	11716	61470
Jumlah	106,245	267,466	373,711	126659	297947	424606
TPAK	79.97	49.72	64.82	76,17	44,55	60,28

Sumber : Sakernas 2012 dan 2013

https://palembangkota.bps.go.id

Dari persentase penduduk usia kerja yang dirinci menurut kegiatan utama dan jenis kelamin di Kota Palembang tahun 2012-2013 (Tabel 7.2) untuk tahun 2012 angkatan kerja yang bekerja sebanyak 92.36 persen laki-laki, perempuan 86.07 persen, sedangkan yang mencari pekerjaan laki-laki 7.64 persen dan perempuan 13.92 persen. Jika diamati dari usia kerja yang bukan angkatan kerja, sekolah menduduki yang tertinggi yaitu 54.51 persen laki-laki, 22.04 persen perempuan, mengurus rumah tangga 11.63 persen laki-laki, 72,41 persen perempuan dan lainnya 33.86 persen laki-laki dan 5.55 persen perempuan. Untuk Tahun 2013 angkatan kerja yang bekerja sebesar 91.52 laki-laki dan 87.26

perempuan, sedangkan yang mencari pekerjaan laki-laki 8.48 persen dan perempuan 12.74 persen. Kalau dilihat dari bukan angkatan kerja terlihat yang sekolah adalah sebesar 54.15 persen laki-laki dan perempuan 20.01 persen, mengurus rumah tangga sebesar 6.57 persen laki-laki dan sebesar 76.06 persen perempuan, dan lainnya sebesar 39.28 persen laki-laki dan 3.93 persen perempuan.

Pada tahun 2012 dan 2013 persentase penduduk yang bekerja sedikt menurun yaitu dari 92.36 persen tahun 2012 menjadi 91.52 persen pada tahun 2013. Sementara itu, pencari kerja/pengangguran meningkat dari 7.64 persen tahun 2012 menjadi 8.48 persen di tahun 2013. Dari hasil diatas didapat bahwa terjadi sedikit penurunan persentase penduduk laki-laki maupun perempuan yang bekerja dari tahun 2012 ke tahun 2013, hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2012 diselenggarakannya pertandingan olahraga se-ASEAN (SEA GAMES) sehingga secara tidak langsung penyelenggaraan SEA GAMES yang diselenggarakan di Palembang membuka kesempatan bekerja secara besar-besaran terutama dalam sektor pembangunan seperti pembangunan jalan, pembangunan wisma atlet dan pembangunan stadium jakabaring, dengan begitu otomasi membuka kesempatan penduduk yang mengganggur untuk bekerja sehingga pengganggguran berkurang. Hal ini tidak terjadi pada tahun 2013 sehingga ada penurunan angka penduduk yang bekerja.

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 7.2
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas dirinci Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2012 -2013

Kegiatan Utama	2012			2013		
	lk	pr	total	lk	pr	total
1	2	3	4	5	6	7
Angkatan Kerja						
Bekerja	92,36	86,07	89,95	91,52	87,26	89,94
Pengangguran	7,64	13,92	10,05	8,48	12,74	10,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bukan Angkatan Kerja						
Sekolah	54,51	22,04	31,27	54,15	20,01	30,19
Mengurus Rumah Tangga	11,63	72,41	55,13	6,57	76,06	55,33
Lainnya	33,86	5,55	13,6	39,28	3,93	14,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas 2012 dan 2013

https://palembangkota.bps.go.id

Dari tabel 7.2 juga terlihat bahwa baik tahun 2012 maupun 2013 persentase penduduk perempuan yang bekerja juga cukup besar, dalam hal ini kaum wanita harus mengerti dan menyadari serta menghayati kedudukannya sendiri, kaum wanita selain sebagai ibu rumahtangga juga mempunyai peranan membantu keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidup

7.2. Distribusi Sektoral

Dalam rangka memperluas lapangan kerja produktif dan mengurangi pengangguran, telah diupayakan berbagai kegiatan melalui beberapa program dibidang ketenagakerjaan. Program-program tersebut telah berhasil memperluas lapangan kerja baru maupun meningkatkan kualitas pekerja. Namun, upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan karena pertumbuhan tenaga kerja baru memasuki persaingan dunia kerja yang menuntut keahlian cukup tinggi. Data distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja dapat digunakan sebagai salah satu indikator guna melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian suatu daerah.

Bahasan selanjutnya mengenai jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kota Palembang, di mana pada tahun 2012 yang menduduki tempat tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa diurutkan kedua, sedangkan diurutan ketiga adalah di sektor lainnya (Pertambangan & Penggalian; Listrik, Gas, dan Air; Konstruksi; Angkutan & Komunikasi; Keuangan) serta sektor industri diurutan keempat.

Jika dilihat jenis kelamin tampaknya penduduk perempuan tertinggi bergerak di sektor Jasa dan diurutan selanjutnya pada sector perdagangan Besar dan Eceran. Sedangkan penduduk laki-laki diurutan pertama di sektor lainnya kemudian disusul sektor perdagangan, sektor jasa, dan disusul oleh sektor industri, secara lebih rinci disajikan pada Tabel 7.3 dari persentase yang disebutkan di atas ternyata sektor perdagangan dan jasa yang paling dominan, hal ini mudah dipahami karena Palembang merupakan daerah perkotaan sebagai lazimnya daerah perkotaan merupakan pusat perdagangan baik perdagangan

https://palembangkota.bps.go.id

eceran maupun perdagangan besar (grosir).

Tabel 7.3
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Palembang Tahun 2010-2012

Kegiatan Utama	2012	2013	
	L+P	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
Sektor Primer	2,1	5,10	1,29
Sektor Sekunder	20,36	28,83	10,69
Sektor Tersier	77,54	66,07	88,03
Jumlah	**100**	**100**	**100**

Sumber : Sakernas 2012 dan 2013

https://palembangkota.bps.go.id

7.3 Status Pekerjaan

Jika kita mengamati status pekerjaan penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin dari tahun 2012-2013 (dapat dilihat pada tabel 7.4). Pekerjaan utama buruh karyawan baik laki-laki ataupun perempuan menduduki tempat yang tertinggi disusul berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, pekerja bebas di pertanian dan di nonpertanian serta pekerja keluarga, berusaha dengan bantan anggota rumah tangga/ buruh tidak tetap, sedangkan yang paling sedikit adalah berusaha dengan buruh tetap. Tingginya jumlah buruh/karyawan tampaknya memang merupakan salah satu ciri daerah perkotaan.

Tabel 7.4
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2012-2013

Kegiatan Utama	2012		2013	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain	19.28	17.99	14,44	17,23
Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/ buruh tidak tetap	6.62	8.66	3,28	5,50
Berusaha dengan dibantu butuh tetap/ butuh dibayar	4.96	2.29	4,45	2,85
Buruh/Karyawan yang Dibayar	63.39	59.64	70,63	64,30
Pekerja Bebas di pertanian/ non pertanian/ pekerja Keluarga	5.37	11.41	7,20	10,11
Total	100	100	100	100

Sumber : Sakernas 2012 dan 2013

https://palembangkota.bps.go.id

Pembahasan selanjutnya adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yang bekerja kurang dari 35 jam. Penduduk Kota Palembang usia 15 tahun ke atas yang bekerja yang bekerja kurang dari 35 jam pada tahun 2013 secara umum mengalami penurunan, yaitu dari 18.07 persen pada tahun 2012 menjadi 13.74 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan angka setengah pengangguran di Kota Palembang mengalami penurunan. Artinya pada tahun 2012 persentase penduduk yang bekerja bisa lebih besar dari tahun

tahun 2013, namun secara kualitas jam kerja mereka di bawah 35 jam dalam seminggu yang lalu, sehingga dapat disimpulkan sebgaian dari pekerja yang bekerja pada tahun 2012 adalah pekerja *part time* (paruh waktu).(Tabel 7.5)

Tabel 7.5
Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin di Kota Palembang 2008-2013

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	14,26	28,03	20,11
2009	11.12	34.09	20.95
2010	9,66	29,8	17
2012	11,7	29,04	18,07
2012	9,31	21,24	13,74

Sumber : Sakernas 2012 dan 2013

https://palembangkota.bps.go.id

KONDISI PEREKONOMIAN

BAB VIII

Dinamika perekonomian tahun 2013 di Kota Palembang mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami menginggat pada tahun 2011 diselenggarakan event Sea Games ke 26 di Kota Palembang. Perhelatan olahraga se-Asia Tenggara tersebut memiliki efek domino yang cukup besar ke berbagai sektor, sehingga menggerakkan roda perekonomian lebih cepat, bahkan tercatat pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Palembang mencapai 9,71 persen (dengan migas). Oleh karena itu, dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi di tahun 2011 akibat momen yang bersifat adhoc (sementara), tentunya mempengaruhi percepatan pertumbuhan perekonomian ditahun berikutnya (2013) di Kota Palembang. Namun demikian secara umum, dinamika perekonomian Kota Palembang pada tahun 2013 relatif tinggi. Berikut dipaparkan beberapa indikator makro ekonomi kota palembang pada tahun 2013 antara lain pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian dan pendapatan perkapita masyarakat Kota Palembang pada tahun 2013.

https://palembangkota.bps.go.id

8.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan tersebut menggambarkan pertumbuhan riil karena dinilai dengan harga konstan yang sudah dihilangkan faktor kenaikan tingkat harga.

Gambar 8.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan
Kota Palembang Tahun 2008 - 2011

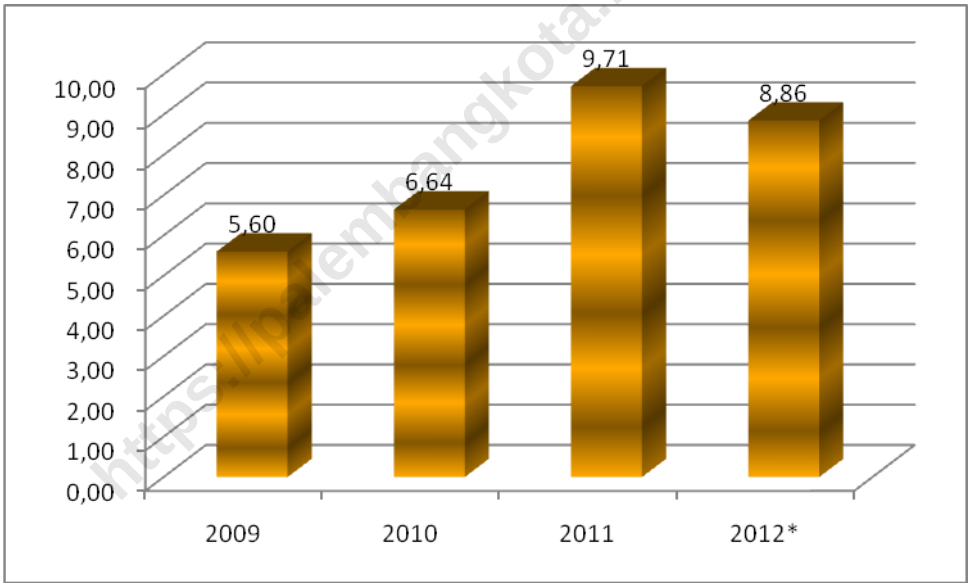

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun sedikit terjadi perlambatan pada tahun 2013 karena tingginya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 karena adanya perhelatan olahraga se-Asia Tenggara Sea Games di Kota Palembang. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang sebesar sebesar 5,60 persen. Pada tahun 2013

laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang tersebut meningkat menjadi 8,86 persen. Kondisi ini menunjukkan bergeraknya pembangunan dan perekonomian di Kota Palembang kearah yang positif. Pembangunan yang digagas oleh pemerintah daerah, seyogyanya sejalan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar terciptanya iklim usaha dan percepatan dalam perekonomiannya. Hal ini telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Palembang, sehingga Palembang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Selatan, kota transit dan pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Selatan dapat mengoptimalkan segenap potensinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dimasa datang.

Tabel 8.1 menggambarkan laju pertumbuhan perekonomian Kota Palembang dari tahun 2009 - 2013. Sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Selatan, kota transit dan pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Selatan terus bertumbuh positif, seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor kontruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran, , sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor listrik.gas dan air bersih.

Laju pertumbuhan perekonomian yang positif tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jembatan, fasilitas perdagangan, perkantoran dan lain-lain. Kondisi ini tentunya menjadi pendorong sektor kontruksi yang menjadi *leader* di bidang ini. Pada Tabel 8.1 sektor kontruksi terus tumbuh positif bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tumbuhnya sektor kontruksi akan memberikan efek domino (*multiplier effect*) bagi sektor lainnya seperti

https://palembangkota.bps.go.id

sektor perdagangan, pengangkutan dan sektor lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada akhirnya pertumbuhan sektor kontruksi dapat menjadi pengerak sektor lain untuk bertumbuh.

Tabel 8.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Palembang Tahun 2009 - 2013 (Persentase)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2013*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	**3,12**	**2,30**	**2,77**	**2,86**
2. Pertambangan & Penggalian	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Industri Pengolahan	**4,02**	**4,44**	**5,89**	**6,55**
4. Listrik, Gas & Air Bersih	**3,53**	**6,22**	**8,35**	**8,57**
5. Konstruksi	**7,12**	**8,03**	**18,46**	**10,73**
6. Perdag., Hotel & Restoran	**2,79**	**6,67**	**7,84**	**9,69**
7. Pengangkutan & Komunikasi	**11,63**	**11,23**	**14,52**	**12,60**
8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	**8,57**	**7,79**	**16,34**	**9,65**
9. Jasa-Jasa	**6,10**	**6,49**	**9,03**	**7,69**
PDRB	**5,60**	**6,64**	**9,71**	**8,86**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

8.2. Struktur Perekonomian

Salah satu indikator yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan dimasa mendatang adalah struktur perekonomian yang ditandai dengan besaran peranan masing-masing sektor dalam membentuk PDRB suatu wilayah/ daerah. Besaran

ini mutlak harus dicermati dalam melihat sektor-sektor yang layak untuk dikembangkan di suatu daerah dengan tidak mengesampingkan berbagai faktor yang berhubungan dengan sosial budaya setempat sehingga pengembangan sektor ekonomi hendaknya tidak menjadi bencana bagi generasi mendatang.

Ditinjau dari struktur ekonomi, perekonomian Kota Palembang didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang ditunjukkan dengan besarnya peranan sektor-sektor ini dalam membentuk nilai tambah. Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada tahun 2013 mencapai kurang lebih 26,53 persen, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,39. Secara Umum struktur ekonomi Kota Palembang tetap didominasi oleh Industri Pengolahan dan Perdagangan Hotel dan Restoran atau bercirikan struktur sekunder dan tersier. (Tabel. 8.2)

https://palembangkota.bps.go.id

Dalam struktur ekonomi Kota Palembang dengan dan tanpa migas, pada tahun 2013 adalah :

1. Sektor primer, terdiri dari sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tidak dimiliki Kota Palembang. Sektor pertanian memberikan sumbangan sekitar 0,55 persen pada pembentukan PDRB Kota Palembang.
2. Sektor sekunder, terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor bangunan. Pada tahun 2013 memberikan sumbangan sebesar 38,18 persen. Sumbangan terbesar berasal dari sektor indutri pengolahan, yaitu sebesar 26,53 persen,

sedangkan terendah adalah sumbangan sektor listrik, air dan gas yaitu hanya 1,56 persen.

3. Sektor Tersier, terdiri dari sektor perdagangan, sektor angkutan, sektor Keuangan, dan sektor jasa-jasa, memberikan sumbangan sebesar 61,27 persen. Sumbangan terbesar didukung oleh sektor perdagangan sebesar 22,39 persen, dan sektor jasa sebesar 16,70 persen.

Tabel 8.2.
Peranan Masing-Masing Sektor Dalam Pembentukan PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Palembang Tahun 2009-2013

Kelompok Sektor	2009	2010	2011	2012*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sektor Primer	**0,70**	**0,64**	**0,60**	**0,55**
a. Pertanian	0,70	0,64	0,60	0,55
b. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sektor Sekunder	**38,47**	**38,19**	**38,77**	**38,18**
a. Industri Pengolahan	28,55	28,45	27,37	26,53
b. Listrik Gas & Air Bersih	1,82	1,71	1,61	1,56
c. Bangunan	8,10	8,03	9,80	10,09
3. Sektor Tersier	**60,83**	**61,16**	**60,63**	**61,27**
a. Perdagangan,Hotel & Resto	22,47	22,74	22,09	22,39
b. Angkutan & Komunikasi	14,01	13,66	14,23	14,45
c.Keuangan, Persewaan & Jasa Pershn	7,53	7,44	7,77	7,73
d. Jasa-jasa	16,82	17,32	16,53	16,70
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

8.3. Pendapatan per kapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini merupakan hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional perkapita.

Angka pendapatan perkapita lazim digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat tingkat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini perlu diinterprestasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan *net factor income*, yaitu selisih antara *income out flow* dengan income *in flow*.

Gambar 8.2 memperlihatkan bahwa perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang dari tahun 2008 hingga tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku, pendapatan per kapita masyarakat tahun 2008 adalah sebesar Rp. 24.462.150. Namun di tahun 2013 telah mencapai Rp. 36.845.310, meningkat sekitar 50,62 persen dibandingkan dengan tahun 2008, atau rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 12,66 persen per tahun.

https://palembangkota.bps.go.id

Gambar 8.2
Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Palembang Tahun 2008 – 2013

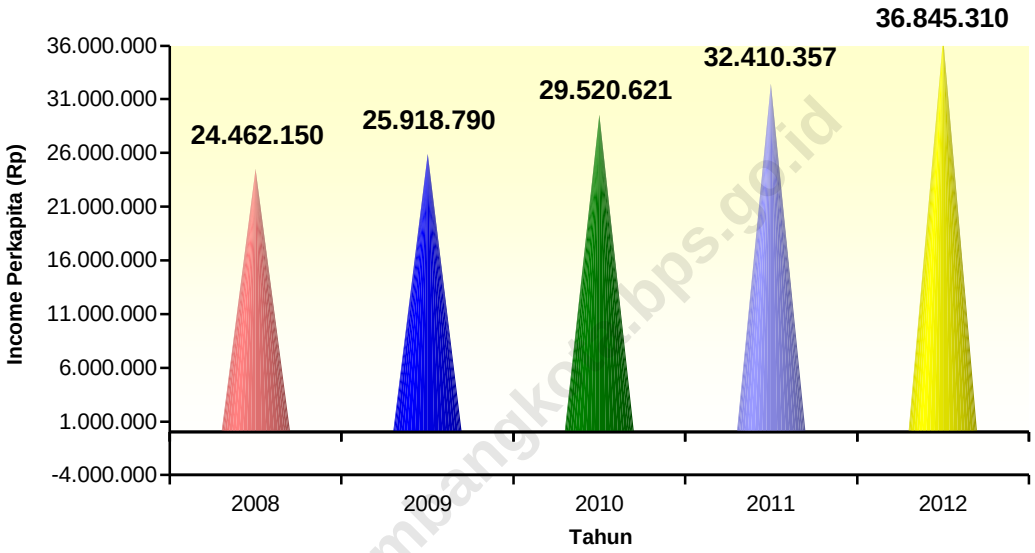

https://palembangkota.bps.go.id

Sumber : BPS Kota Palembang

Untuk melihat secara riil seberapa besar tingkat pertumbuhan perkapita yang diakibat oleh peningkatan output adalah dengan memperhatikan perkembangan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan. Berdasarkan atas harga konstan, pendapatan per kapita masyarakat Kota Palembang pada tahun 2008 sebesar Rp. 9.276.834. Pada tahun 2013, pendapatan perkapita masyarakat Kota Palembang telah mencapai Rp. 11.759.496, meningkat 26,76 persen sejak tahun 2008, atau secara rata-rata hanya mengalami peningkatan 6,69 persen per tahun.

Tabel 8.3
Pendapatan Perkapita dan Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Palembang
Tahun 2008 -2013

Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
Tahun	**Nilai (Rp.)**	**Pertumbuhan (%)**	**Tahun**	**Nilai (Rp.)**	**Pertumbuhan (%)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	24.462.150		2008	9.276.834	
2009	25.918.790	5,95	2009	9.647.392	3,99
2010	29.520.621	13,90	2010	10.172.809	5,45
2011	32.410.357	9,79	2011	10.960.844	7,75
2012	36.845.310	13,68	2012	11.759.496	7,29
2008 - 2012		50,62	**2008 - 2012**		26,76
Rata – Rata per Tahun		*12,66*	***Rata – Rata per Tahun***		*6,69*

Sumber : BPS Kota Palembang

https://palembangkota.bps.go.id

Jika melihat pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan ini, maka laju peningkatan sebesar 7,29 persen pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada tahun 2011, yang tumbuh sebesar 7,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa output tumbuh lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk tahun 2013. Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk sangat mempengaruhi *income* perkapita. Jika jumlah pertumbuhan penduduk semakin tinggi yang diiringi dengan pertumbuhan output yang konstan akan mengakibatkan berkurangnya *income* perkapita. Strategi pokok dalam rangka peningkatan *income* perkapita adalah dengan cara memacu pembangunan ekonomi melalui

peningkatan output yang dibarengi dengan langkah menahan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

https://palembangkota.bps.go.id

KONDISI PERUMAHAN

BAB IX

Kebutuhan perumahan atau papan bagi masyarakat merupakan kebutuhan pokok setelah makanan dan pakaian. Apabila kebutuhan pokok ini belum dapat terpenuhi oleh setiap keluarga maka tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah dikatakan masih sangat rendah sekali. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Oleh karena itu rumah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Indikator perumahan dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari luas lantai, jenis dinding, jenis atap dan beberapa fasilitas perumahan yang dinikmati oleh masyarakat itu sendiri mencerminkan tingkat kesejahteraannya. Dapat dicontohkan misalnya suatu rumah tangga yang rumahnya berjenis lantai tanah, beratap daun, berdinding bambu, lampu minyak, air mandi cuci kakus (MCK) tidak ada, sudah tentu jika ditinjau dari sisi kesehatan tidak memenuhi faktor-faktor kesehatan dan menjadi ciri bahwa yang menempati rumah tersebut adalah rumah tangga miskin.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi perumahan di Kabupaten Musi Banyuasin, pada bab ini akan diuraikan beberapa indikator perumahan dan pemukiman seperti kondisi fisik bangunan, penguasaan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal serta kondisi lingkungan.

https://palembangkota.bps.go.id

9.1. Kondisi Fisik Bangunan

9.1.1. Rata-Rata Luas Lantai

Luas lantai dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk. Pemerintah mengharapkan bahwa satu rumah idealnya ditempati oleh satu rumahtangga dengan jumlah anggota rumahtangga yang tidak terlalu banyak. Luas lantai yang cenderung sempit dianggap kurang sehat karena rawan terhadap bibit penyakit yang dapat ditularkan kepada sesama anggota rumahtangga. Semakin luas lantai yang dihuni diharapkan semakin baik kondisi kesehatan rumahtangga tersebut.

Salah satu indikasi rumah sehat menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita minimal 10 m^2. Berdasarkan luas lantai yang digunakan terbanyak pada tahun 2013 adalah rumah tangga yang menghuni dengan luas lantai berkisar 20–49 m^2 yaitu sebesar 54,1 persen, kedua rumah tangga dengan luas 50–99 m^2 sebesar 33.5 persen, sedangkan rumah tangga dengan luas lebih dari 100 m^2 persentasenya masih di bawah rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 20 m^2, begitu pula dengan tahun 2012 persentase rumah tangga yang menghuni dengan luas lantai berkisar antara 20-49 m^2 dan 50–99 m^2 menduduki peringkat pertama dan kedua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keadaan rumah penduduk khususnya luas lantai memiliki kualitas yang cukup baik. secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel (9.1).

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 9.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kabupaten Palembang
Tahun 2012-2013

Luas Lantai	Persentase		
		2012	2013
(1)		(3)	
<20		N	9,6
20 – 49		5,97	54,1
50 – 99		56,72	33,5
>100		36,98	2,8
Total	100	100	100

Sumber : Susenas 2012 - 2013

https://palembangkota.bps.go.id

9.1.2. Jenis Atap

Rumah beratap genteng masih mendominasi sebagian besar rumah tinggal penduduk Kota palembangpada setiap tahunnya yaitu tercatat sebesar 66,29 persen di tahun 2012 dan 46,9 persen ditahun 2013, kemudian disusul rumah dengan atap seng sebesar 23,27 persen di tahun 2012 dan meningkat menjadi 36 persen di tahun 2013 (lihat Tabel 9.2).

Sedangkan persentase rumah beratap beton tidak banyak yaitu hanya 4,9 persen di tahun 2013 dan 2,09 persen ditahun sebelumnya. Namun demikian keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi bangunan tempat tinggal penduduk Kota palembangcukup baik dengan total persentase rumahtangga yang menghuni rumah beratap seng/asbes, genteng dan beton sebesar 99 persen. Sementara itu persentase rumahtangga yang mendiami rumah beratap kayu, ijuk dan daun-daunan relatif kecil yaitu hanya sekitar 1 persen. Hal ini dapat diartikan

tingkat kesejahteraan penduduk Kota palembangpada tahun 2013, jika dilihat dari jenis atap terluas dari tempat tinggalnya, mengalami peningkatan menjadi lebih baik.

Tabel 9.2
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Kota palembangTahun 2012

Jenis Atap	Persentase	
	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Beton	2,09	4,9
Genteng	66,29	46,5
Sirap	1,12	0,3
Seng	23,27	36
Asbes	3,85	11,5
Ijuk/Rumbia	2,09	0,5
Lainnya	1,28	0,2
Total	100	100

Sumber : Susenas 2012 - 2013

https://palembangkota.bps.go.id

9.1.3. Jenis Dinding

Indikator persentase rumahtangga menurut jenis dinding tempat tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi kondisi tempat tinggal yang mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan kualitas kesehatan penghuninya. Adapun kategori jenis dinding pada tahun 2013 terbagi dalam 3 kategori yaitu tembok, kayu dan selain tembok dan kayu. Jenis dinding tembok merupakan kategori tertinggi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang

baik. Semakin tinggi persentase pada kategori ini, menunjukkan kecenderungan semakin tingginya kesejahteraan rumahtangga penghuninnya. Dari hasil Susenas 2012 – 2013 dapat dilihat rumah tangga di Kota palembangyang menghuni rumah dengan jenis dinding tembok dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2012 persentase rumahtangga dengan jenis dinding tembok sebesar 37,72 persen dan meningkat menjadi 40,2 persen pada tahun 2013.

Tabel 9.3
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terbanyak dan Daerah Tempat Tinggal di Kota palembangTahun 2012

Jenis Dinding	Persentase	
	2012	2013
(1)	(3)	(4)
Tembok	37,72	40,2
Kayu	61,16	59,4
Bambu	0,48	0,3
Lainnya	0,64	0,1
Total	100	100

Sumber : Susenas 2010 - 2013

Persentase rumahtangga yang tinggal di rumah berdinding kayu masih cukup besar di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu sebesar 36.57 persen pada tahun 2010 dan 28.9 persen pada tahun 2012 dan 2013. Kondisi ini dapat dimaklumi menginggat bahwa rumah asli masyarakat Sumsel termasuk wilayah Kota palembangadalah berbentuk panggung yang sebagian besar berbahan baku dari kayu. (lihat Tabel 9.3).

Berdasarkan Tabel 9.3 dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota palembangpada tahun 2013, berdasarkan indikator

https://palembangkota.bps.go.id

jenis dinding tempat tinggal, sudah cukup baik bahkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

9.1.4. Jenis Lantai

Pada tahun 2012 jenis lantai bukan tanah mendominasi sebagian besar perumahan di Sumsel termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian besar rumah masyarakat Palembangadalah berbentuk panggung yang berlantai dan berdinding kayu. Sementara itu persentase rumahtangga yang menempati rumah berlantai tanah dan lainnya tergolong kecil pada tahun 2012 yaitu yang berlantai tanah sebesar 2.89 persen (lihat Tabel 9.5). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum jenis lantai rumah di Palembangpada tahun 2012 tergolong cukup baik yaitu dengan proporsi rumah berlantai bukan tanah mencapai 96,63 persen.

https://palembangkota.bps.go.id

Tabel 9.4

Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai dan Daerah Tempat Tinggal di Kota palembangTahun 2012

Jenis Lantai	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Marmer/keramik/granit	12,84	11,5
Tegel/teraso	5,46	2,4
Semen	39,33	45,8
Kayu	39,00	36,4
Tanah	2,89	3,7
Lainnya	0,48	0,2
	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2012

Dengan tingkat pendapatan yang sudah cukup tinggi, masyarakat semakin menyadari terhadap kualitas bangunan terutama lantai rumah yang turut mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Lantai tanah kemungkinan besar dapat menjadi sarang penyakit karena bibit penyakit menyukai keadaan tanah di dalam rumah yang lembab. Selain itu tingkat kebersihan rumah kurang dapat dijaga.

https://palembangkota.bps.go.id

9.2. Utilitas dan Fasilitas Tempat Tinggal.

Pada subbab Utilitas dan Fasilitas Tempat Tinggal disajika indikator kesejahteraan masyarakat dintinjau dari sisi ketersediaan sarana dan fasilitas yang menunjang kualitas hidup masyarakat ditinjau dari sudut kesehatan. Disamping itu, ketersediaan dan kualitas beberapa fasilitas yang ada, mencerminkan tingkat perekonomian masyarakat. Berikut di paparkan Utilitas dan Fasilitas Tempat Tinggal masyarakat di Kota palembangpada tahun 2013.

9.2.1. Sumber Penerangan

Rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik PLN sebagai sumber penerangan tahun 2013 di Kota palembangmencapai 97,73 persen. Kondisi ini sedikit lebih rendah dibanding pada tahun 2012, dimana persentase rumah tangga yang menggunakan PLN mencapai 97.8 persen. Hal ini diduga akibat adanya rumahtangga baru yang belum bisa mengakses pelayanan penerangan listrik PLN dengan berbagai alasan. Fenomena ini tentunya menjadi catatan dan perhatian dari pemerintah Kota palembangbekerjasama dengan PT. PLN Persero agar meningkatkan pelayanan dan ketersediaan fasilitas jaringan listrik sampai

keberbagai daerah pinggiran Kota palembang(Tabel 9.5)

Tabel 9.5

Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Penerangan dan Daerah Tempat Tinggal di Kota palembangTahun 2012

Sumber Penerangan	Persentase	
	2012	2013
(1)	(3)	(4)
Listrik PLN	68,86	79,4
Listrik Non PLN	19,74	13,9
Petromak/Aladin	6,26	3
Pelita/ Obor/ Sentir	4,01	2,2
Lainnya	1,12	1,6
Jumlah	100	100

Sumber : Susenas 2012 - 2013

https://palembangkota.bps.go.id

9.2.2. Fasilitas air minum

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dapat ditinjau dari segi keberadaan fasilitas air minum yaitu kepemilikan sendiri karena dapat lebih menjamin kebersihan air yang dikonsumsi. Pemakaian fasilitas air minum secara bersama bahkan dapat dipakai siapa saja (umum), dari segi kesehatan dan sanitasi lingkungan kurang baik karena sulit memelihara dan memantau kebersihan air dan lingkungan sekitarnya. Semakin besar proporsi atau persentase rumahtangga yang mempunyai fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesadaran kesehatan penduduk di daerah tersebut.

Dari tahun 2010 hingga tahun 2013 rumahtangga di Kota palembangyang telah memiliki fasilitas air minum sendiri selalu menduduki peringkat pertama. Tercatat pada tahun 2010 sebesar 76,64 persen, tahun 2012 sebesar 74,3 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 86,2 persen;

Tabel 9.6
Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Air Minum
dan Daerah Tempat Tinggal di Kota palembangTahun 2012

Fasilitas Air Minum	Persentase	
	2012	2013
(1)	(3)	(4)
Sendiri	66,60	73,9
Bersama	17,56	20,7
Umum	12,02	4,5
Lainnya/Tidak Ada	3,82	0,8
Jumlah	100	100

Sumber : Susenas 2012 - 2013

https://palembangkota.bps.go.id

Pada tahun 2013 sebanyak 12,4 persen fasilitas air minum milik bersama; 0.1 persen fasilitas air minum milik umum dan 1,3 persen lainnya atau tidak memiliki fasilitas air minum. (lihat Tabel 9.6). Ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat Kota palembangsudah cukup baik kesejahteraan hidupnya dan cukup tinggi kesadaran akan kesehatan diri dan lingkungannya. Untuk rumahtangga yang menggunakan sumber air minum secara bersama atau umum biasanya dialami oleh rumahtangga yang tinggal di rumah kontrakan atau *"bedeng"*.

9.2.3. Sumber air minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air yang memenuhi standar kesehatan dalam jumlah yang cukup terutama untuk minum dan memasak mutlak diperlukan untuk hidup sehat. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya air bersih bagi penduduk. Kesadaran kesehatan yang semakin baik dipengaruhi oleh respon masyarakat terhadap berbagai informasi yang berupa penyuluhan dan iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik yang mengutamakan pentingnya kesehatan diri dan lingkungan.

https://palembangkota.bps.go.id

Kesadaran masyarakat di Kota palembang akan pentingnya penggunaan air bersih dapat dilihat dari penggunaan sumber air minum. Pada tahun 2012 persentase rumahtangga yang menggunakan sumber air tertutup cukup besar walaupun sebagian besar masih berupa sumur terlindung (45.59 persen) (lihat Tabel 9.9).

Tabel 9.7

Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum dan Tempat Tinggal Di Kota palembangTahun 2012-2013

Sumber Air Minum	2012	2013
(1)	(3)	(4)
Air kemasan bermerk	0,48	1,0
Air isi ulang	13,48	7,6
Leding meteran	9,31	8,9

Leding eceran	1,93	0,9
Sumur bor/pompa	1,44	0,3
Sumur terlindung	45,59	64,6
Sumur tak terlindung	16,37	10,4
Mata air terlindung	0,48	0,3
Mata air tak terlindung	0,80	0,1
Air sungai	6,90	4,0
Air hujan	3,21	0,4
	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2012

Penggunaan air isi ulang di Kota palembangpada tahun 2012 cukup besar (13,48 persen), hal tersebut memang sudah sangat diminati oleh masyarakat karena tingkat kepraktisannya yaitu langsung dimunum tanpa dimasak terlebih dahulu.

Namun demikian di Kabupaten MUBA masih terdapat masyarakatnya yang memprihatinkan, masih cukup besar persentase rumahtangga pengguna air sungai dan air hujan yaitu sekitar 10,11 persen

https://palembangkota.bps.go.id

9.3.4. Jarak ke Tempat Penampungan Tinja

Indikator perumahan lainnya yang cukup penting untuk menggambarkan kualitas perumahan adalah jarak tempat penampungan tinja. Jarak yang memenuhi kesehatan antara sumber air minum dengan tempat penampungan tinja minimal 10 meter. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari perembesan kotoran ke dalam sumber air minum.

Pada tahun 2012 untuk rumah tangga yang menggunakan pompa, sumur atau mata air sebagai sumber air minum tercatat sebanyak 51,12 persen rumah tangga yang jarak pembuangan tinjanya telah memenuhi kriteria > 10 m, sedangkan yang berjarak ≤10 m ada sebanyak 32,51 persen rumah tangga.

Secara umum pemahaman sanitasi lingkungan bagi masyarakat Palembangtelah cukup baik.

Tabel 9.8

Persentase Rumahtangga Menurut Jarak ke Penampungan Tinja dan Daerah Tempat Tinggal di Kota palembangTahun 2012

Fasilitas Air Minum	2012	2013
(1)	(3)	(4)
< 10 m	32.51	36,8
>= 10 m	51.12	46,8
Tidak tahu	16.38	16,4
	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2012

https://palembangkota.bps.go.id

KEMISKINAN

BAB X

10.1 Definisi dan Metode Pengukuran Kemiskinan

Fenomena kemiskinan dianggap menjadi "stigma" atau penghalang dalam perkembangan pembangunan nasional. Kemiskinan memiliki wujud yang beraneka ragam termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan, kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbelakangan, kurang akses kepada pendidikan serta layanan-layanan pokok lainnya. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (Kuncoro, 2004: 141).

Kemiskinan merupakan masalah global yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya bagi suatu negara. Oleh karena itu, mengurangi tingkat kemiskinan selalu menjadi tujuan di hampir setiap negara. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat ini dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita rakyat (Debraj, 1998: 8).

Kemiskinan di definisikan sebagai ketidak mampuan individu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan **konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).**

https://palembangkota.bps.go.id

Metode yang digunakan oleh BPS dalam menghitung jumlah penduduk miskin adalah dengan menentukan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Dalam rumusan matematis sebagai berikut:

GK= GKM + GKNM .....(1)

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Merujuk rumusan diatas maka, seorang penduduk dikatakan miskin apabila ia memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan **dibawah Garis Kemiskinan**. Penghitungan Garis Kemiskinan ini dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

10.2 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

https://palembangkota.bps.go.id

1. **Head Count Index (HCI-P_0),** yaitu persentase penduduk atau rumahtangga miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P_1)** yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. *Semakin tinggi nilai indeks*, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P_2)** yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. *Semakin tinggi nilai indeks*, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

https://palembangkota.bps.go.id

10.3 Perkembangan Kemiskinan di Kota Palembang

Tabel 10.1 menunjukkan indikator kemiskinan di Kota Paelmbang 5 tahun terakhir (2008-2013). Secara agregat jumlah penduduk miskin di Kota Palembang terus mengalami peningkatan, namun secara persentase polanya relatif menurun.

Tabel 10.1
Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan dan Garis Kemiskinan Kota Palembang Tahun 2008 -2013

INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2013*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk **(000)**	235,27	211,8	218,5	210.0	206,1
Persentase Pddk Miskin **(%)**	16,66	14,75	15	14,3	13,59
Indeks Kedalaman	3,09	2,39	2,67	2,87	2,2
Indeks Keparahan	0,87	0,63	0,74	0,85	0,59
Garis Kemiskinan **(RP/Kap/Bln)**	244.223	294.174	315.634	344.939	376.965

Keterangan: *: Angka Sementara
Sumber: BPS Kota Palembang

Tabel 10.1 juga menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang dilambangkan dengan indeks kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2008 indeks kedalaman kemiskinan penduduk Kota Palembang mencapai 3,09 dan terus menurun menjadi 2,2 pada tahun 2013. Artinya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dari tahun ketahun semakin berkurang.

Ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kota Palembang dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dari indeks keparahan di Kota Palembang (Tabel 10.1) semakin kecil. Pada Tahun 2008 indeks keparahan sebesar 0,87 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 0,59.

Beberapa indikator kemiskinan diatas mengacu pada garis kemiskinan yang secara agregat terus meningkat (Tabel 10.1). Hal ini dikarenakan adanya pengaruh inflasi yang meningkatkan jumlah pengeluaran masyarakat.

Indikator kemiskinan di Kota Palembang 5 (lima) tahun terakhir cenderung membaik, hal ini searah dengan indikator kesejahteraan rakyat lainnya seperti indikator kesehatan, indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, kondisi perekonomian dan indikator perumahan. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang tentunya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu kondisi perekonomian Kota Palembang yang terus tumbuh, menyerap tenagakerja dari masyarakat lokal yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Palembang.

https://palembangkota.bps.go.id

Kondisi merupakan faktor pemicu terus menurunnya angka kemiskinan di Kota Palembang secara gradual.

https://palembangkota.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Badan Pusat Statistik Kota Palembang
Jl. PAK. Abdul Rohim No. 2 - Talang Semut
Telp./Fax. 0711 - 352184
e-mail : bps1671@mailhost.bps.go.id
http://palembangkota.bps.go.id

https://palembangkota.bps.go.id